

KOMUNIKATOR

JURNAL
MEDIA,
BUDAYA,
DAN
DEMOKRASI

ISSN 1979-6765



Jurnal Komunikator fokus pada studi dan kajian terhadap isu-isu tentang media, baik media cetak, elektronik serta media baru dan berbagai isu-isu komunikasi antar budaya dan demokrasi. Terbit satu tahun dua kali yaitu Mei dan November. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

MITRA BESTARI

David Holmes,
Monash University, Australia

Turnomo Raharjo,
Universitas Diponegoro, Indonesia

Ninik Sri Rejeki,
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Ratna Noviani,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Prahastiwi Utari,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sri Hastjarjo,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Atwar Bajari,
Universitas Padjadjaran

Hilman Latief,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Zuly Qodir,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dewan Penyunting

Tri Hastuti Nur Rochimah,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Taufiqurrahman,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muria Endah Sokowati
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DEWAN REDAKSI

Pimpinan Redaksi
Tri Hastuti Nur Rochimah

Tim Redaksi
Taufiqurrahman
Fajar Junaedi
Filosa Gita Sukmono

Redaksi Pelaksana
Zein Mufarrih Muktaf

Kesekretariatan
Siti Wijayati

Admin Jaringan
Erwin Rasyid

ALAMAT REDAKSI

Jurnal Komunikator d.a Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kampus Terpadu,
Jl. Lingkar Selatan Yogyakarta 55183 Po Box 1063,
telp (0274) 387656 pesawat 175, fax: (0274) 387646,
email: adminjkm@umy.ac.id, jurnal.komunikator@gmail.com | Website: journal.umy.ac.id

Editorial

Pokemon Go, Media Baru dan Tantangan Riset Komunikasi

Pada pertengahan tahun 2016, sebuah permainan (*game*) yang aplikasinya diunduh di telepon pintar yang terkoneksi yang terkoneksi secara daring (*online*) menjadi fenomena global. Viral media dari permainan ini media sosial telah mendudukannya sebagai topik utama yang diperbincangkan. Lebih dari itu, Pokemon Go menyita perhatian media arus utama yang menjadikannya sebagai berita utama.

Permainan ini dianggap sebagai loncatan menuju era baru interaksi manusia dengan teknologi melalui basis teknologi *augmented reality*. Teknologi ini mampu menyajikan kolaborasi dunia animasi dan dunia nyata. Monster Pokemon yang dulunya hanya hadir di layar telepon pintar, kini bisa terlihat di dunia nyata melalui kamera yang tertanam di perangkat telepon pintar serta bantuan teknologi *Global Positioning System* (GPS).

Permainan Pokemon Go mengartikulasikan kembali mengenai perkembangan kajian komunikasi, terutama dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin cepat. Aplikasi yang tertanam di telepon pintar telah memberikan tantangan baru dalam kajian komunikasi, baik dari perspektif komunikator, pesan, media, audiens maupun efeknya. Kontroversi taksi berbasis

aplikasi, yang dipelopori oleh Grab dan Uber, yang diprotes oleh taksi konvensional bisa dirujuk sebagai sebuah fenomena yang seharusnya mampu ditelaah oleh para dosen, mahasiswa dan para periset komunikasi. Begitu juga dengan meledaknya Go – Jek yang semakin mendekatkan media baru kepada audiens, yang sekaligus memungkinkan audiens menjadi produsen sekaligus konsumen.

Media baru kini semakin melekat dengan kehidupan manusia. Determinisme teknologi yang meyakini bahwa struktur masyarakat berkembang tergantung dengan perkembangan teknologi dan beriringannya perkembangannya semakin menemukan pembenarannya di era teknologi digital. Pokemon Go sebagai pintu awal menuju *augmented reality* harus dilihat sebagai tantangan baru dalam penelitian komunikasi kontemporer.

Kajian tentang teknologi ini dari berbagai perspektif komunikasi adalah tantangan yang harus dijawab melalui berbagai riset komunikasi. Kami memandang bahwa kajian – kajian mengenai determinisme teknologi perlu semakin intensif dilakukan, dipresentasikan dalam konferensi ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Pedoman Penulisan

- Karya tulis berdasar pada hasil penelitian dan sebelumnya belum dimuat di jurnal yang lain. Artikel harus ditulis dalam format MS Word dan kemudian dikirimkan kepada editor melalui email: jurnalkomunikatorumy@umy.ac.id
- Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Naskah harus ditulis dengan bahasa Indonesia/ bahasa Inggris yang baik.
- Naskah harus berisi : judul; nama (bisa dua orang), institusi asal penulis, alamat email, alamat pos surat menyurat penulis; abstrak (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), kata kunci, pendahuluan; kajian teori/kajian literatur, metode penelitian, Pembahasan/hasil temuan/analisis, dan simpulan.
- Naskah harus dibuat dalam dua spasi pada ukuran latter atau A4 dengan margin 2,5 cm di setiap sisi.
- Judul menggunakan format: center, di atas, dan bold.
- Judul tidak boleh terlalu panjang
- Abstrak ditulis tidak lebih dari 250 kata. Bahasa Inggris di tulis miring (italic), dan dengan format spasi single.
- Abstrak harus diikuti 3-4 kata kunci.
- Sub judul agar mudah dibaca, supaya mengikuti format sebagai berikut;
 - Sub judul pertama : margin kiri, dimulai dengan huruf kapital dan bold.
 - Sub judul kedua : margin kiri, dan bold
 - Sub judul ketiga : bold mengikuti paragraf yang ada.
- Tabel, grafik, figure, dan peta harus memperhatikan integrasi dengan teks dan berkontribusi secara signifikan supaya pesan si penulis bisa dipahami. Maka dari itu disarankan untuk mempersiapkan bagian perbagian halaman yang dipresentasikan.
- Figure harus berkualitas baik, grayscale atau hitam putih dan penomorannya konsisten dengan menggunakan angka arab.
- Tabel harus diketik dan termasuk bagian dari naskah.
- Yakinkan bahwa tabel dan figur dibuat secara lengkap.
- Untuk pengutipan harus memasukan semua nama penulis. Pengutipan publikasi dalam teks :
 - Menggunakan nama belakang penulis (Mcguire, 2006)
 - Pengutipan menggunakan dua nama (Agranoff dan McGuire, 2003)
 - Terdiri dari tiga nama, maka tulis nama terakhir pada nama penulis pertama (Agranoff, et al., 2001). Hal yang sama jika penulis lebih dari tiga.
 - Pemberian halaman mengikuti tahun publikasi setelah koma. Contoh, "... (Mcguire, 2006, h. 18)....". Penggunaan titik koma untuk memisahkan seri referensi, pisahkan menurut urutan alphabet, bukan urutan tahun. Contoh, ".....(Jeong, 2007; McGuire, 2006; Stoker, 1998; Thomson et al., 2007)....".
- Daftar pustaka adalah semua karya teks yang dikutip, yang kemudian kompilasi dalam urutan abjad. Format untuk buku, jurnal, makalah, koran. Berikut caranya ;
 - Buku
 - Agranoff, R. 2007. *Managing within Networks: Adding Value to Public Organizations*. Washington, DC: Georgetown University Press.
 - Agranoff, R & McGuire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
 - Jurnal
 - Agranoff, R. 2006. "Inside Collaborative Network : Ten Lessons for Public Managers". [Spesial issues]. *Public Administrative Review*. 66(6):56-65.

-
- Hohepa, M., Scholfield, G., & Kolt, G.S. (2006). *Physical activity : What do high school students think?* Journal of Adolescent Health, 39 (3), 328-336. (doi:10.1016/j.jadohealth.2005.12.024)
 - Artikel koran
 - The Jakarta Post. 2008. “Bali to have e-government in two years, governor says”. The Jakarta Post, (17 November) A.8
 - Diamond, S. 1985. “The Disaster in Bhopal: Lessons for the Future”. New York Times (3 February): A7
 - Halaman web
 - Statistic New Zealand. (2007). New Zealand in profile 2007, diunduh dari <http://www.stats.govt.nz>
 - Lainnya
 - Behrens, C. and Kholid, A 2011. “Comparative Study Governance in Europe”. Workpaper for the APPSI Forum 8, 10/12/2011 in Semarang.
 - Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, pasal 16 ayat 1.
 - Hak cipta : Harap dipatuhi bahwa karya belum pernah dipublikasikan sebelumnya (kecuali form abstrak, atau bagian publikasi dosen atau tesis) jika belum dipublikasikan dimanapun, dan jika kemudian naskah publikasi disetujui, secara otomatis penulis menyetujui transfer hak cipta kepada penerbit.

VI

Jurnal Komunikator

AKSES INFORMASI PERTANIAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SAMBAS DAN KOTA SINGKAWANG

Abstrak

Akses terhadap informasi pertanian para petani sayur dan petani padi dipengaruhi oleh ketersediaan media komunikasi dan faktor-faktor internal dan faktor eksternal petani. Metode yang digunakan metode survei, responden berasal dari dua kelompok yaitu petani sayur dan petani padi. Responden terdiri 2 klaster yaitu kelompok petani sayur dan petani padi, masing-masing kelompok 55 orang, sehingga total responden 110 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk mengakses informasi pertanian adalah tingkat kosmopolitan. Informasi pertanian yang dibutuhkan petani sayuran adalah pemasaran, sedangkan pada petani padi informasi yang dibutuhkan adalah teknologi produksi. Perbedaan tersebut menunjukkan ada perbedaan antara akses informasi pertanian antara petani sayur dan petani padi.

Kata Kunci : akses informasi, media komunikasi, petani

Abstract

Access to agricultural information to farmers vegetable and rice farmers could be affected by the availability of communications media and internal factors and external factors farmers. With the method of the survey, respondents came from two clusters namely vegetable growers and rice farmers. Each cluster number of respondents 55 people, bringing the total respondents 110 farmers. The results showed that the factors that influence farmers to access agricultural information is a cosmopolitan level. While agricultural information needed vegetable farmers is marketing, the rice farmers the information needed is the technology of production. It shows there is a difference between access to agricultural information between farmers vegetable and rice farmers.

Keywords : access to information, communication media, farmers

PENDAHULUAN

Informasi yang dibutuhkan petani dalam pengelolaan usahatani dapat beragam sesuai dengan komoditas usahatani. Secara garis besar, informasi pada bidang pertanian secara luas dapat dikategorikan menjadi beberapa sub kegiatan dalam usahatani. Informasi pertanian tersebut berupa teknologi dan inovasi produksi, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil, iklim dan cuaca, permintaan/penawaran dan permodalan. Beberapa informasi pertanian tersebut, dapat diakses melalui media komunikasi yang tersedia disekitar petani.

Dalam memperoleh informasi, petani dapat memanfaatkan media komunikasi. Media komunikasi merupakan saluran komunikasi yang dapat menyampaikan pesan berupa informasi yang diperlukan. Media komunikasi dapat berupa media komunikasi interpersonal, lengkap. Selain pertimbangan tersebut, usahatani yang diusahakan dengan jenis komoditas yang berbeda antara petani satu dengan petani lainnya dapat menjadi pertimbangan dalam memilih media komunikasi

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka kajian akses informasi pertanian melalui

media komunikasi perlu dilakukan. Untuk itu, kajian tentang faktor karakteristik petani yang dapat mempengaruhi pemanfaatan media komunikasi berupa pendidikan, frekuensi komunikasi, nilai manfaat ekonomi komoditas, tingkat kosmopolitan dan kebutuhan informasi pertanian perlu diidentifikasi lebih lanjut. Hasil studi diharapkan bermanfaat sebagai informasi dasar dalam peningkatan kapasitas hasil pembangunan pertanian berupa penyebarluasan informasi pertanian yaitu inovasi baru. Sehingga dapat merencanakan strategi dalam memilih media komunikasi untuk menyebarkan informasi pertanian media komunikasi kelompok dan media komunikasi massa. Media komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani setiap saat untuk memperoleh informasi pertanian yang dibutuhkan.

Informasi merupakan bagian dari pesan dalam proses komunikasi dimana komunikan (petani) memperoleh pesan berupa inovasi melalui sumber komunikasi. Melihat proses komunikasi tersebut, maka dalam praktek penyebarluasan inovasi, peran sumber (komunikator) dan komunikan sangat penting dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, komunikasi juga dilakukan dan sering kali menjadi kegiatan yang harus terus dikembangkan seakrab mungkin antar instansi, antar bagian, antar sub-sistem, antar organisasi, dan lain-lain. Sehubungan dengan ragam bentuk, pelaku, dan tujuan komunikasi seperti yang digambarkan maka di dalam proses pembangunan, komunikasi memiliki arti penting, Mardikanto (2010) mengemukakan adanya empat peranan komunikasi di dalam pembangunan, yang meliputi :

1. Penyadaran atau menerangkan/ menunjukkan kepada segenap masyarakat tentang jati diri mereka dan keadaan yang sedang dihadapi.
2. Memberikan aspirasi (baru) terhadap warga masyarakat
3. Menunjukkan alternatif atau teknik-teknik

“baru” yang dapat dimanfaatkan atau diterapkan bagi perbaikan mutu hidup masyarakat sasaran.

4. Menerangkan dan memilih alternatif yang dirasakan paling tepat oleh masyarakatnya untuk melepaskan diri dari masalah yang dihadapi.

Peranan penting dari komunikasi tersebut, dalam praktek penyebaran informasi pertanian berupa teknologi dan inovasi pertanian dilakukan pada penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pertanian memiliki beberapa pengertian yang luas. Diantaranya adalah penyebarluasan informasi. Yang dimaksud dengan “penyebaran informasi” di sini, sebenarnya mencakup penyebaran beragam informasi. Ditinjau dari isi materinya, informasi tersebut dapat mencakup, Mardikanto (1993) :

1. Ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi upaya peningkatan jumlah dan perbaikan mutu produksi; baik selama proses menghasilkan, pengolahan hasil, penyimpanan dan pengepakannya hingga produksi tersebut diterima oleh konsumen.
2. Analisis ekonomi yang berkaitan dengan upaya memperoleh pendapatan dan atau keuntungan dari kegiatan berusaha.
3. Ragam kelembagaan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan produksi dan pendapatan atau keuntungan usahatani.
4. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melakukan “rekayasa-sosial” demi tercapainya tujuan peningkatan produksi dan pendapatan / keuntungan yang diinginkan.
5. Peraturan dan kebijakan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan upaya peningkatan produksi dan pendapatan / keuntungan usahatani.

Melihat manfaat yang dari pengaruh informasi, maka perlu untuk dipilih media komunikasi yang tepat agar proses komunikasi efektif. Beberapa media komunikasi yang

dapat dipilih oleh petani diantaranya media komunikasi interpersonal, media komunikasi kelompok dan media komunikasi massa. Petani dapat memilih semua media komunikasi yang ada untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Tetapi tidak semua media komunikasi memiliki pengaruh yang sama dalam penyebaran informasi.

Hasil penelitian Widiyanti (2007) menyebutkan pola komunikasi interpersonal dan kelompok memiliki pengaruh dalam membangun pola komunikasi tentang usahatani. Komunikasi interpersonal cenderung memiliki interaksi yang luas dalam berkomunikasi. Pola komunikasi interpersonal dan kelompok banyak melibatkan sumber informasi dari petani lain. Sedangkan Iswardayati (2006), mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa seni karawitan memiliki pengaruh yang nyata menjadi media komunikasi dalam menyebarluaskan teknologi PHT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media komunikasi yang dipilih petani untuk memperoleh informasi merupakan media komunikasi yang dikenal dan dekat dengan budaya masyarakat.

Memilih media komunikasi untuk mengakses informasi pertanian disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan karakteristik petani. Beberapa faktor karakter petani adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam membangun pola pikir individu. Individu yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi memiliki pola pikir yang luas, baik wawasan maupun ilmu-ilmu dalam usahatani. Pola pikir dan wawasan merupakan kawasan kognitif yang dapat dirubah melalui pendidikan.

Penelitian Raya et al. (2011), menyebutkan bahwa pendidikan memiliki hubungan terhadap penggunaan media komunikasi. Penggunaan media komunikasi tersebut diantaranya media interpersonal dan internet. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka seseorang akan sering dan berinteraksi dengan anggota keluarga dan orang disekitar.

Begitu juga dengan media komunikasi internet, yang mampu memberikan segala informasi yang dicari harus diimbangi dengan keterampilan menggunakan media bantunya seperti komputer dan telepon seluler.

Frekuensi komunikasi merupakan intensitas petani dalam melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan merupakan proses dalam memanfaatkan media komunikasi. Proses komunikasi dapat dilakukan melalui media interpersonal, kelompok dan massa. Petani pada umumnya akan melakukan komunikasi kepada individu atau kelompok yang dekat. Sebagai contoh, sumber-sumber informasi yang dapat diakses petani adalah PPL, peneliti, kios sarana produksi, dan perusahaan swasta. Semakin sering frekuensi komunikasi dilakukan, maka intensitas petani dalam memanfaatkan sumber informasi akan semakin besar. Penelitian Bulu et al. (2009) menjelaskan bahwa keterdedahan informasi yang terdiri dari interaksi, akses informasi, frekuensi komunikasi dan intensitas komunikasi dalam adopsi inovasi tanaman jagung di NTT memberikan gambaran bahwa informasi memberikan peran penting dalam adopsi inovasi jagung. Beberapa variabel penelitian yang berpengaruh dalam adopsi inovasi jagung diantaranya frekuensi komunikasi dan intensitas komunikasi.

Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa intensitas komunikasi inovasi atau kesungguhan untuk menerima informasi inovasi sangat ditentukan oleh kebutuhan akan informasi inovasi yang bersangkutan. Intensitas komunikasi petani mengenai inovasi jagung lebih tinggi terjadi pada sumber informasi inovasi utama dibanding dengan sesama petani, tokoh masyarakat, media cetak, dan audio visual. Frekuensi komunikasi yang terjalin sangat tinggi karena tingkat intensitas komunikasi inovasi atau tingkat kesungguhan dalam menerima informasi inovasi akan semakin kuat.

Nilai manfaat ekonomi komoditas yang diusahakan petani dapat memberikan dorongan dalam hal memanfaatkan media komunikasi. Komoditas usaha tani merupakan investasi yang menjadi sumber pendapatan. Harapan tersebut semakin tinggi jika memiliki manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi menjadi tujuan utama petani dalam memilih komoditas. Keputusan petani untuk memilih jenis usahatani dan inovasi tidak didasarkan atas rekomendasi pihak luar dengan keuntungan yang dicapai, melainkan didasarkan atas pertimbangan petani pada faktor-faktor lain seperti kepastian pasar, kemampuan pembiayaan, dan modal usaha.

Bulu et al. (2009) menjelaskan bahwa nilai manfaat ekonomi inovasi jagung baik dipromosikan oleh institusi pemerintah berpengaruh dalam adopsi inovasi jagung. Nilai manfaat ekonomi jagung yang semakin tinggi secara konsisten memperkuat modal sosial dalam adopsi inovasi jagung. Hal ini dapat dijelaskan bahwa karakteristik nilai manfaat ekonomi inovasi jagung yang ditawarkan melalui berbagai media komunikasi dengan menggunakan jaringan komunikasi dan kerjasama mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan petani terhadap inovasi yang bersangkutan.

Tingkat kosmopolitan merupakan keaktifan petani dalam mencari informasi. Aktifitas tersebut dapat berupa mencari dan memanfaatkan sumber media komunikasi atau mencari sumber informasi langsung. Tingkat kosmopolitan akan terwujud bila informasi yang dicari oleh petani tersedia dan dibutuhkan dalam mendukung usahatani. Oleh sebab itu, akses informasi perlu didukung dengan ketersediaan kelembagaan dan sarana akses informasi. Andriaty et.al (2011), melaporkan bahwa tingkat kekosmopolitan dan tingkat manfaat informasi memiliki pengaruh nyata dalam akses informasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan daerah yang mudah mengakses informasi dan daerah yang sulit mengakses

informasi memiliki beda yang nyata. Kondisi tersebut akan mendorong petani menjadi semakin kosmopolitan untuk mencari informasi dalam mendukung kegiatan usahatani. Semakin tinggi tingkat ketersediaan sarana akses informasi akan mendorong tingkat kosmopolitan yang semakin tinggi dan selanjutnya akan meningkatkan tingkat manfaat informasi yang diakses karena semakin semakin beragam dan komprehensifnya informasi yang diperoleh dan sumber informasi yang diakses.

Dalam akses informasi pertanian, selain tingkat kosmopolitan dan tingkat manfaat informasi tingkat kebutuhan informasi pertanian menjadi dorongan dalam individu petani. Motivasi berupa dorongan untuk mencari informasi pertanian merupakan faktor internal yang berasal dari petani. Motivasi petani dalam memenuhi kebutuhan informasi pertanian yang semakin kuat dan konsisten akan membentuk perilaku petani dalam memanfaatkan sumber-sumber media komunikasi.

Dalam menerapkan inovasi pada usahatani, petani akan berusaha melengkapinya dengan informasi pertanian. Selain informasi tentang produksi dan pengolahan hasil, informasi penting lainnya adalah permintaan dan penawaran pasar. Informasi tersebut menjadi dominan ketika komoditas yang diusahakan akan segera panen. Kebutuhan informasi pertanian dalam wilayah satu dengan lainnya akan berbeda. Wilayah dengan akses informasi pertanian yang mudah akan memberikan kemudahan dalam akses informasi. Seperti yang dilaporkan Andriyati et al. (2011), informasi yang paling dibutuhkan petani adalah yang berkaitan dengan teknologi produksi, diikuti informasi pemasaran dan pascapanen. Kebutuhan akan informasi tersebut masih belum terpenuhi. Petani menggunakan pertemuan, media cetak, dan media elektronik untuk mengakses informasi. Media yang paling sering diakses adalah pertemuan, diikuti media elektronik dan media cetak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dan eksplanatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan Kabupaten Sambas mewakili wilayah tanaman pangan yaitu padi sedangkan Kota Singkawang mewakili wilayah komoditas sayur.

Sampel penelitian adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berada di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Sampel petani sayur 55 orang yang diambil secara acak dari beberapa kelompok tani. Begitu juga petani padi berjumlah 55 orang yang diambil secara acak dari beberapa kelompok tani. Sehingga total sampel 110 petani.

Teknis analisis data yang digunakan analisis statistik *Parametrik*. Analisis data yang digunakan yaitu uji hubungan (*korelasi*) untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan media komunikasi. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan akses informasi pertanian antara kelompok tani di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang menggunakan uji beda (*t-Tes*). Untuk mengetahui kebutuhan informasi pertanian teknik analisis data yang digunakan adalah statistik *inferensial*.

HASIL dan PEMBAHASAN

Identitas Responden

Dari jumlah responden 110 petani, terdiri dari 55 petani sayur dan 55 petani padi. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, petani sayur dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 70,90% sedangkan perempuan 29,10%. Demikian juga petani padi, jenis kelamin laki-laki 90,10% sedangkan perempuan 9,10%. Karakteristik jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi pekerjaan sebagai petani, baik pada petani sayur dan petani padi.

Karakteristik umur petani sayur cenderung masih relatif produktif yaitu dengan rata-rata 43 tahun. Dengan jumlah ≤ 43 tahun berjumlah 50,90% dan >43 tahun 49,10%. Dari jumlah tersebut umur produktif relatif lebih banyak. Pada petani padi karakteristik umur cenderung lebih tua dibanding petani sayur. Umur rata-rata 55 tahun dengan kategori ≤ 55 berjumlah 47,27% sedangkan >55 berjumlah 52,73%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa karakter umur pada petani padi cenderung lebih banyak dengan umur tua (tidak produktif).

Pendidikan formal petani, baik petani sayur maupun petani padi rata-rata menempuh 6 tahun. Enam tahun merupakan pendidikan dasar yaitu SD. Pendidikan formal petani padi yang menyelesaikan pendidikan

Tabel 1. Karakteristik Petani Sayur dan Petani Padi

Karakteristik Individu	Petani Sayur		Petani Padi	
	Kategori	Jumlah (%)	Kategori	Jumlah (%)
Jenis Kelamin	Laki	70,90	Laki	90,90
	Perempuan	29,10	Perempuan	9,10
Umur (th)	≤ 43	50,90	≤ 55	47,27
	> 43	49,10	>55	52,73
Pendidikan (th)	≤ 6	70,90	≤ 6	67,27
	>6	29,10	>6	32,73
Pengalaman Bertani (th)	≤ 11	65,45	≤ 33	56,36
	>11	34,55	>33	43,64
Kepemilikan Lahan (m ²)	≤ 3011	40	≤ 7258	54,54
	>3011	60	>7258	45,55

Sumber : Data Primer, 2015

sayur sebanyak 29,10% sedangkan petani padi 32,73%. Dengan jumlah tersebut baik petani sayur maupun petani padi belum menyelesaikan pendidikan formal. Karena sebagian besar tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

Pengalaman bertani sayur rata-rata 11 tahun. Sedangkan petani padi 33 tahun. Perbedaan ini terjadi karena petani sayur di Kota Singkawang berlatar belakang petani transmigrasi. Sedangkan petani padi di Kabupaten Sambas merupakan pekerjaan dan mata pencaharian utama. Petani sayur dengan pengalaman bertani > 11 tahun berjumlah 34,55%. Sedangkan petani padi dengan pengalaman bertani > 33 tahun 43,64%. Sebagian besar petani padi di Kabupaten Sambas berumur lanjut, sehingga memiliki pengalaman bertani rata-rata 33 tahun.

Kepemilikan lahan petani sayur rata-rata 3011 m². Kepemilikan lahan di bawah 3011 m² berjumlah 40%, sedangkan petani padi kepemilikan lahan lebih dari 3011 m² berjumlah 60%. Sedangkan petani padi memiliki rata-rata kepemilikan lahan 7258 m². petani dengan kepemilikan lahan di bawah 7258 m² berjumlah 54,54% sedangkan lebih dari 7258 m² berjumlah 45,55%.

Komoditas yang ditanam petani sayur didominasi oleh jagung, timun, sawi, bayam, kangkung, labu, bengkoang, kacang panjang, terong dan buncis. Sayuran tersebut dijual di pasar Kota Singkawang, Pontianak, dan Sintang. Beberapa sayuran ada juga yang dijual sampai ke luar negeri yaitu Brunei Darussalam berupa bengkoang dengan kualitas A.

Petani padi di Kecamatan Tebas menanam padi unggul dan padi lokal. Kedua padi ini ditanam dengan bergiliran. Padi unggul ditanam pada musim gadu, sedangkan padi lokal pada musim rendengan. Produktivitas rata-rata yang dihasilkan adalah 2,20 ton/ha.

Media Komunikasi dan Informasi Pertanian

Media komunikasi merupakan sarana petani untuk memperoleh informasi di bidang pertanian. Media komunikasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang terlibat. Media komunikasi yang ada yaitu, media interpersonal, kelompok dan massa. Media interpersonal merupakan media komunikasi berupa dua orang atau lebih yang melakukan proses komunikasi. Media kelompok merupakan media komunikasi yang dilakukan oleh kelompok khususnya kelompok tani dalam melakukan proses komunikasi berupa bertukar informasi di bidang pertanian. Sedangkan media massa merupakan media komunikasi dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik sebagai sumber informasinya. Berikut sebaran jumlah petani yang memanfaatkan media komunikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Dalam memanfaatkan media komunikasi, petani sayur dan petani padi sudah memanfaatkan ketiga media. Media interpersonal yang dimanfaatkan petani 57,30% dalam kategori rendah dan 42,70% dalam kategori tinggi. Media interpersonal yang banyak dimanfaatkan petani sayur dan petani padi adalah interaksi sesama petani, pedagang dan distributor benih dan pestisida. Interaksi sesama petani dilakukan ketika

Tabel 2. Sebaran Petani Dalam Memanfaatkan Media Komunikasi

No	Media	Skor	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Interpersonal	5 – 15	Rendah	63	57,30
		16 – 25	Tinggi	47	42,70
2	Kelompok	5 – 15	Rendah	91	82,73
		16 – 25	Tinggi	19	17,27
3	Massa	5 – 15	Rendah	101	91,81
		16 – 25	Tinggi	9	9,9

berada di kebun atau di sawah, selain itu interaksi juga dilakukan pada saat petani menjual hasil ke pedagang pengepul sayur dan distributor benih dan pestisida yang selalu aktif mengunjungi petani. Interaksi ini

Media kelompok yang ada adalah pertemuan kelompok tani, kegiatan penyuluhan kelompok dan beberapa pertemuan yang diselenggarakan distributor benih dan pestisida. Frekuensi petani mengikuti pertemuan kelompok cenderung rendah. Hal ini disebabkan pertemuan kelompok hanya dilakukan rata-rata sebulan dua kali. Petani dengan kategori rendah 82,73% sedangkan kategori tinggi 17,27%. Kecenderungan petani mengikuti kegiatan kelompok sangat rendah dikarenakan tidak semua petani dapat selalu hadir dalam pertemuan. Selain itu, pertemuan yang diselenggarakan penyuluh pertanian hanya mengundang dari pengurus kelompok saja.

Media massa yang dimanfaatkan petani sayur dan padi adalah televisi, koran dan internet. Media tersebut digunakan petani untuk memperoleh informasi teknis seputar dunia pertanian. Petani dengan kategori rendah berjumlah 91,81% sedangkan kategori tinggi 9,9%. Petani dengan kategori tinggi berasal dari kalangan usia muda. Mereka mencari informasi pertanian dari berbagai sumber media massa untuk membantu mengembangkan usatani mereka. Namun tidak setiap hari media massa seperti televisi dan koran memiliki informasi pertanian. Sehingga petani hanya menunggu jadwal siaran dan terbitnya informasi pertanian.

Berbeda dengan internet, hampir setiap saat menyediakan informasi pertanian. Selain lengkap media internet juga lebih *up date*.

Informasi pertanian yang dibutuhkan petani sayur dan petani padi sangat berbeda. Antara petani sayur dan petani padi memiliki karakter usahatani yang berbeda mulai dari komoditas, pasar dan konsumen. Beberapa informasi pertanian diantaranya teknologi produksi, teknologi pengolahan, pemasaran, cuaca/iklim, permintaan dan penawaran dan permodalan.

Petani sayur informasi pertanian yang dominan di akses adalah pemasaran. Informasi pasar yang diakses petani sayur untuk mengetahui bagaimana prospek pasar sayur di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya. Selain itu, harga dan pedagang yang membawa hasil panen juga tidak luput oleh petani sayur untuk mengetahuinya.

Petani padi lebih dominan mengakses informasi teknologi produksi atau budidaya. Informasi ini sangat diperlukan oleh petani padi untuk meningkatkan produksi mereka. Dalam informasi teknologi produksi, petani ingin memperbaiki cara budidaya padi yang baik dan benar. Mulai dari pengolahan lahan, semai, menanam, perawatan sampai pemanenan. Petani padi memperoleh keahlian menanam padi selama ini dari orang tua. Sehingga keterampilannya selalu dihasilkan turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Oleh karena itu mereka ingin memperbaiki cara bertani padi yang baik dengan memperoleh informasi pertanian.

Tabel 3. Informasi pertanian yang diakses petani sayur dan petani padi

No	Informasi	Petani Sayur		Petani Padi	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Teknologi Produksi (budidaya)	9	16,36	43	78,20
2	Teknologi Pengolahan	8	14,54	1	1,80
3	Pemasaran	25	45,45	5	9,10
4	Cuaca/Iklim	2	3,65	0	0
5	Permintaan dan penawaran	5	9,10	0	0
6	Permodalan	6	10,90	6	10,90

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengakses informasi pertanian

Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengakses informasi pertanian berasal dari internal dan eksternal individu. Faktor-faktor tersebut berupa pendidikan, frekuensi komunikasi, nilai manfaat ekonomi komoditas, tingkat kosmopolitan dan kebutuhan informasi pertanian. Hasil dari pengujian statistik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengakses informasi pertanian adalah faktor tingkat kosmopolitan.

Variabel tingkat kosmopolitan memiliki t-hitung 10.098 dengan signifikansi 0,000. Artinya memiliki hubungan yang kuat terhadap faktor petani mengakses informasi pertanian baik pada petani sayur maupun petani padi. Tingkat kosmopolitan merupakan

tingkat tinggi dan rendahnya petani mencari informasi baik di sekitar tempat tinggal atau luar tempat tinggal. Sekitar tempat tinggal, petani mencari informasi melalui petani yang aktif mendapatkan informasi baru. Sedangkan di luar tempat tinggal petani memperoleh melalui pedagang dan distributor benih dan pestisida.

Sedangkan uji T-Tes menunjukkan menghasilkan taraf signifikansi yang sama-sama signifikan. Sehingga ada perbedaan antara akses informasi petani sayur dan petani padi. Perbedaan tersebut dari media dan akses informasi yang diperlukan. Pada petani sayur, media komunikasi yang digunakan memiliki kecenderungan media kelompok. Pada petani padi lebih dominan interpersonal. Sedangkan informasi yang banyak dibutuhkan petani sayur adalah pasar, sedangkan petani padi adalah teknis produksi atau budidaya.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik (Korelasi) antar variabel

No	Variabel	t- hitung	sig
1	Pendidikan	-.379	.705
2	Frekuensi komunikasi	.821	.413
3	Nilai manfaat ekonomi komoditas	-1.594	.114
4	Tingkat kosmopolitan	10.098	.000
5	Kebutuhan informasi pertanian	1.661	.100

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengakses informasi pertanian

No	Variabel	Skor	Kategori	Jumlah (orang)	(%)
1	Umur	16 – 33	Muda	11	10
		34 – 51	Sedang	48	43,64
		52 – 70	Tua	51	36,36
2	Frekuensi Komunikasi	6 – 14	Rendah	10	9,1
		15 – 23	Sedang	93	84,54
		23 – 30	Tinggi	7	6,36
3	Nilai Manfaat	3 – 8	Kecil	1	0,90
		9 – 13	Sedang	20	18,20
		14 – 18	Besar	89	80,90
4	Tingkat Kosmopolitan	8 – 24	Rendah	86	78,20
		25 – 32	Tinggi	24	21,80
5	Kebutuhan Informasi	5 – 10	Rendah	10	9,10
		11 – 15	Tinggi	100	90,90

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi petani dalam mengakses informasi pertanian adalah tingkat kosmopolitan. Semakin tinggi (sering) petani mencari informasi pertanian maka akses terhadap informasi akan semakin tinggi. Pada petani sayur dan petani padi ada perbedaan yang nyata terhadap akses informasi pertanian, informasi pertanian yang dibutuhkan oleh petani sayur adalah pemasaran, sedangkan petani padi adalah teknologi produksi (budidaya).

Untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi pertanian, kelompok tani dapat mengelola informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait untuk disebarluaskan ke anggota-anggota kelompok tani melalui pertemuan rutin kelompok. Selain itu pelatihan pemanfaatan teknologi informasi berupa internet dan perangkatnya dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriaty, Ety., Sankarto, Bambang dan Setyorini. 2011. *Kajian Kebutuhan Informasi Teknologi Pertanian di Beberapa Kabupaten di Jawa*. Jurnal Perpustakaan Pertanian. Vol.20, Nomor 2, 2011.
- Anggari, Pang S. 2008. *Peranan Penyuluhan Pembangunan untuk Keberhasilan Pembangunan Nasional*. Pemikiran Guru Besar IPB. Perspektif Ilmu-ilmu Pertanian dalam Pembangunan Pertanian. Penebar Swadaya. Bogor.
- Bulu, Yohanes G., Hariadi, Sunarru S., Herianto, Ageng S., dan Mudyono. 2009 *Pengaruh Modal Sosial dan Keterdedahan Informasi Inovasi Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Jagung di Kabupaten Lombok Timur, NTT*. Jurnal Agro Ekonomi, Volume No. 1, Mei 2009. Hal : 1-20
- Iswardayanti, Nani Tri. 2006. *Kajian Efektifitas Seni Karawitan Sebagai Media Pemasarakatan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*. Jurnal ilmu-ilmu Pertanian. Vol.2, Nomor 2, Desember 2006. Hal : 112-118
- Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta
- Mardikanto, Totok. 2010. *Komunikasi Pembangunan*. UNS Press. Surakarta
- Pratiwi, Mutia Rakhmi. 2014, *Peran ICT bagi Organisasi Media Massa dan Budaya Masyarakat*, Jurnal Komunikator, Vol. 6 No. 1, Hal 20-26.
- Raya, Alia Bihrajihant., Harsoyo., Witjaksono, Roso dan Sarmiasih, Yuli. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Media Komunikasi dalam Seleksi Konsumsi Produk Pertanian*. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. Volume 8, Nomor 2, Desember, 2011
- Widiyanti, Emi. 2007. *Pola Komunikasi Pertanian Dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Desa Ngabeyan Kec. Sidoharjo Kabupaten Wonogiri*. Jurnal M'Power, No. 5. Vol. 5 Maret 2007.



Konstruksi Pemberitaan Mediasi Karaton Kasunanan Surakarta

Abstrak

Penelitian ini fokus pada pemberitaan mengenai mediasi konflik Karaton Kasunanan Surakarta. Mediasi terjadi karena adanya penolakan hasil keputusan rekonsiliasi pada tahun 2012. Mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil menyelesaikan konflik. Hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi dalam konflik, membutuhkan beberapa elemen agar mediasi mampu mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing oleh Robert N. Entman. Analisis framing dipilih karena penelitian ini berkaitan dengan penyaringan informasi terhadap media. Temuan menunjukkan bahwa adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Kasunanan Surakarta, terjadi pelemahan budaya karaton pada pelaksanaan mediasi, dan timbulnya rasa ketidakpercayaan terhadap mediasi yang difasilitasi pemerintah.

Kata Kunci : Media Massa, Framing, Konflik, mediasi

Abstract

This study focused on reporting on conflict mediation Karaton Surakarta. Mediation occurs because of the rejection of the decision of reconciliation in 2012. However, the mediation

did not succeed in resolving the conflict. It shows that the mediation requires several elements to be able to achieve the goal. This study uses qualitative research methods by using the frame analysis as proposed by Robert N. Entman. Framing analysis is selected for this study because it relates to the filtering of information to the media. The findings suggest that the rejection of Roy Suryo as the conflict's mediator is because no trust from one of the conflicting party. Moreover, it also finds that there is a tendency to obey the culture in the mediation process.

Keywords : Mass Media, Framing, Conflict, mediation

PENDAHULUAN

Karaton Kasunana Surakarta berdiri pada tanggal 17 Februari 1945 di Desa Sala atau yang dikenal dengan Kota Solo. Wafatnya Paku Buwono XII pada tahun 2004 meninggalkan polemik yang membuat Karaton Kasunanan Surakarta mengalami konflik internal. Konflik terjadi karena PB XII tidak mempunyai permaisuri dan putera mahkota untuk menggantikan kekuasaannya sebagai raja. Oleh karena itu, ditetapkan dua kandidat raja dari putra tertua selir PB XII, yaitu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan. Penetapan ini menimbulkan polemik yang menyebabkan terjadinya duaslime kepemimpinan di Karaton Kasunanan Surakarta (Liputan6.com, 2013).

Rekonsiliasi pada tanggal 16 Mei 2012 di Hotel Dharmawangsa dilakukan untuk menyelesaikan konflik dualisme raja tersebut. Dari rekonsiliasi ini menemui kesepakatan, yakni KGPH Hangabehi ditetapkan sebagai Raja dengan gelar S.I.S.K.S Paku Buwono XIII, sedangkan KGPH Tedjowulan ditetapkan sebagai Maha Patih Panembahan Agung (Solopos.com, 2014). Rekonsiliasi tersebut mendapatkan pertentangan dari GKR Wandansari atau Mbak Moeng yang mendirikan Lembaga Dewan Adat (Solopos.com, 2014).

Salah satu cara yang dilakukan Karaton Surakarta dalam menyelesaikan konflik dengan melibatkan mantan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang dianggap sebagai pihak netral. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai mediator konflik. Hal ini terkait dengan latar belakang Roy Suryo yang masih keturunan Pakualaman merupakan Catur Sagatra, ialah pendiri Mataram Islam. Terkait dengan Roy Suryo sebagai mediator konflik, Humas Karaton Kasunanan Surakarta K.P Bambang Pradotonagaro menyatakan keterlibatan Roy Suryo sebagai mediator konflik merupakan dampak dari dilupakannya kesepakatan Rekonsiliasi 16 Mei 2012 yang dilakukan oleh sentana dalem yang mengakibatkan munculnya Dewan Adat (Solopos.com, 2014).

Namun penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator konflik mendapat penolakan dari beberapa kerabat karaton. Seperti yang diungkapkan oleh adik ipar raja, KRMH Satriyo Hadinagoro yang menyatakan masalah karaton aneh bila diurus oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dulu sudah benar diurus oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga ini suatu kemunduran (Solopos.com, 2014). Dari pernyataan tersebut dapat terlihat adanya ketidaksetujuan mengenai Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Solo.

Saat ini konflik tidak bisa dihindari oleh organisasi dan cara untuk meminimalkan masalah yang akan timbul itu sangat penting dalam pengelolaan yang tepat. Dalam suatu organisasi, keberadaan konflik merupakan masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan (Fuller dan Rice, 2014, h. 328). Pada Karaton Solo, konflik yang terjadi tidak dapat dihindari jika terdapat pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan rekonsiliasi. Konflik yang terus menerus terjadi ini menimbulkan krisis dalam organisasi Karaton Solo. Tidak hanya itu, konflik Karaton Solo juga menjadi pemberitaan dalam media surat kabar, tidak terkecuali media lokal Kota Solo, yakni Solopos. Peningkatan berita mengenai

konflik merupakan ketidaksejalannya antara pihak yang terlibat dalam konflik yang diberitakan (Hasani, et al., 2014, h. 1017).

Pendefinisian konflik diambil dari bahasa latin, yakni '*com*' yang memiliki arti bersama-sama, dan juga '*figere*' yang mempunyai arti menyerang. Dari pendefinisian tersebut, konflik merupakan usaha yang dilakukan bersama-sama untuk saling menyerang. Konflik dapat terjadi ketika adanya perbedaan kepentingan yang saling bersimpangan dengan tujuan akhir masing-masing (Widiastuti, 2012, h. 149). Seperti yang terjadi pada Karaton Solo, konflik ini ditimbulkan karena adanya penolakan hasil keputusan rekonsiliasi yang terjadi dalam internal keluarga karaton.

Krisis bisa mengancam kelangsungan organisasi karena terjadi dengan tidak terduga. Apabila krisis terjadi, bisa menimbulkan kerugian bagi organisasi sehingga menuntut adanya penyelesaian secepatnya karena bisa mengganggu kinerja organisasi (Wolf dan Mejri, 2010, h. 49). Krisis pada Karaton Solo terjadi sudah sejak lama. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak karaton dan pemerintah daerah tidak dapat membuat krisis tersebut berakhir. Hal ini membuat pemerintah pusat turun tangan dalam menangani kasus ini.

Terjadinya krisis dapat merubah persepsi masyarakat menjadi negatif terhadap organisasi. Hal ini bisa berdampak pada rusaknya reputasi organisasi di mata *stakeholder* maupun publik atau masyarakat (Coombs, 2007, h. 165). Saat krisis terjadi, reputasi Karaton Kasunanan Surakarta menjadi terancam. Karaton Solo dianggap sebagai pemimpin, jika konflik internal tidak bisa di selesaikan sendiri hal ini menimbulkan pikiran negatif pada masyarakat.

Lerbinger dalam bukunya '*Facing Risk and Responsibility*', menjelaskan mengenai penanganan krisis merupakan hal yang harus segera diwujudkan untuk mempengaruhi siapa yang dinilai dan bagaimana tindakan penyelesaiannya (Heath, 2009, h. 9). Upaya

penyelesaian telah dilakukan oleh pihak Karaton Solo dan Pemerintah Daerah Kota Solo. Namun upaya ini belum bisa menyelesaikan konflik, sehingga pemerintah pusat turun tangan.

Komunikasi krisis sangat diperlukan apabila suatu organisasi mengalami situasi krisis. Komunikasi dilakukan sebagai bentuk respon dari krisis yang terjadi untuk bertanggungjawab kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Kegagalan dalam mengelola krisis dapat menimbulkan bahaya yang serius, ketika organisasi mengalami kerugian bahkan bisa berakibat organisasi tersebut dapat berakhir. Untuk itu, manajemen krisis diperlukan untuk menyelesaikan krisis dan sangat penting bagi suatu organisasi (Wolf dan Mejri, 2010, h. 50). Langkah yang diambil oleh Karaton Solo untuk menyelesaikan konflik ini dengan melibatkan pemerintah pusat. Namun usaha rekonsiliasi yang telah dilakukan mendapat penolakan dari internal karaton.

Menurut Gray dalam Wolf dan Mejri (2010), komunikasi krisis terkait dengan pengelolaan hasil, dampak dan persepsi publik dari krisis. Ketika terjadi krisis, dibutuhkan komunikasi krisis yang digunakan untuk menyelesaikannya sehingga citra akan tetap menjadi baik (Wolf dan Mejri, 2010, h. 49). Dalam situasi krisis, organisasi publik atau swasta menjadi rentan. Ketika organisasi mengambil strategi diam, masyarakat mencari informasi di media massa yang menyebabkan atribusi tanggung jawab krisis. Pemberitaan konflik di media massa memerlukan penanganan khusus sebagai tindakan tanggung jawab dari berita yang ada di media massa seperti media berita harian maupun tabloid (Cmeciu, et al., 2015, h. 42). Media berperan penting dalam situasi krisis. Terutama berita di media massa, tidak terkecuali situs surat kabar harian media online di internet yang juga memiliki peranan sangat penting dalam masa krisis terjadi.

Solopos turut mengiringi jalannya proses

penyelesaian konflik pada Karaton Kasunanan Surakarta. Pemilihan berita pada surat kabar harian media online dikarenakan dalam perkembangan informasinya lebih cepat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Solopos merupakan media lokal Solo. Unsur kedekatan geografis dan emosional merupakan faktor yang dianggap penting bagi masyarakat Kota Solo untuk mengetahui perkembangan konflik Karaton Solo. Solopos memiliki jangkauan yang cukup luas di Karesidenan Surakarta. Pemilihan periode pemberitaan tahun 2014 karena Solopos.com masih banyak memberitakan mengenai mediasi konflik.

Pemberitaan mengenai konflik Karaton Surakarta cukup menarik perhatian publik, terutama masyarakat disekitar Kota Solo. Konflik di Karaton Surakarta berbeda dibandingkan dengan organisasi lain karena itu adalah budaya organisasi yang berbasis masyarakat. Karaton memiliki hukum dan aturan yang berbeda sendiri. Karakteristik budaya yang ada di Karaton Surakarta berbeda dari organisasi lain. Mereka memiliki norma tertentu, etika, dan simbol, aturan yang mengatur perilaku mereka dan percaya. Sebagai keluarga kerajaan, mereka hidup dengan doktrin untuk mematuhi pemimpin untuk kebaikan. Mereka mengikuti tradisi yang sudah tertanam dalam hidup mereka (Purworini, 2016, h. 11).

Permasalahan yang terjadi, media tidak bisa bersifat netral. Ada atribut-atribut yang mengkondisikan pesan. Seperti yang diungkap oleh Mashall McLuhan, '*the medium is the message*', medium sendiri itu merupakan pesan. Apa yang dikatakan akan ditentukan oleh media itu sendiri. Budiman (1992) dalam Sobur (2006), pesan-pesan yang disalurkan oleh media mengandung muatan ideologis yang berpihak kepada kepentingan para penguasa (Sobur, 2006). Teks berita pada Solopos.com juga mengandung pesan yang sesuai dengan ideologinya sebagai media massa lokal.

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai penguat penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Camelia Cmeciu, Cristina Coman, Monica Pătruț, dan Fănel Teodorașcu tentang bayi baru lahir tewas pada kebakaran tahun 2010 di Giulesti Maternity Hospital di Bucharest. Penelitian ini berfokus pada ulasan berita mengenai krisis di empat surat kabar nasional. Hasil menunjukkan dari pemberitaan tersebut dapat ditemukan adanya atribusi tanggung jawab, *human interest*, konsekuensi ekonomi, konflik, dan moralitas (Cmeciu et al., 2015, h. 42). Peneliti melihat penggunaan framing tidak hanya untuk surat kabar cetak saja, namun bisa juga digunakan untuk surat kabar pada media online. Serta fokus penelitiannya yang berhubungan dengan organisasi.

Penelitian selanjutnya oleh Moch. Irsyad Mahlafi mengenai pemberitaan Rekonsiliasi Karaton Solo. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas pesan yang ingin disampaikan tentang pemberitaan pada surat kabar Solopos mengenai rekonsiliasi Karaton Kasunanan Surakarta periode bulan Mei – Juni 2012. Penelitian ini menghasilkan pemberitaan mengenai rekonsiliasi terjadi karena konflik budaya. Terdapat temuan lainnya, seperti disharmonisasi budaya hubungan internal keluarga karaton, dekonstruksi budaya karaton, dan politisasi konflik karaton (Mahlafi, 2013, h. 3). Penelitian ini berfokus pada pemberitaan rekonsiliasi karaton, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pemberitaan mengenai mediasi Karaton Kasunanan Surakarta yang difasilitasi oleh pemerintah. Mediasi adalah proses penyelesaian lanjutan dari konflik Karaton Solo dimana hasil rekonsiliasi mendapatkan perlawanan dari pihak internal Karaton.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang konstruksi pemberitaan pada harian surat kabar media online Solopos.com mengenai mediasi yang dilakukan oleh pemerintah pada

tahun 2014 dalam menyelesaikan konflik pada Karaton Kasunanan Surakarta. Konflik di Karaton Kasunanan Surakarta sudah terjadi sejak lama. Dikarenakan Raja Paku Buwono XII yang tidak meninggalkan permaisuri dan putera mahkota. Oleh karena itu terjadi konflik dualisme raja diantara putera tertua dari selir PB XII. Dualisme raja merupakan kepemimpinan yang dipimpin oleh dua orang raja. Sehingga pemerintah dan Karaton Solo melakukan rekonsiliasi pada tahun 2012 guna menyelesaikan permasalahan dualisme raja ini. Namun dari hasil rekonsiliasi terjadi adanya penolakan hasil keputusan rekonsiliasi yang mengakibatkan konflik belum bisa terselesaikan. Hal ini yang membuat konflik yang terjadi pada Karaton Solo menjadi krisis.

Solopos.com dipilih karena faktor kedekatan geografis dengan Karaton Kasunanan Surakarta. Seringnya Solopos.com memberitakan mengenai mediasi konflik karaton. Ditemukan ada 16 artikel berita mengenai mediasi konflik karaton. Sedangkan surat kabar lokal Solo yang lain, yakni seperti media surat kabar harian lokal kota Solo Joglosemar hanya memberitakan 2 berita mengenai mediasi karaton.

Analisis Framing oleh Robert N. Entman digunakan untuk mengetahui konstruksi berita mengenai mediasi Karaton Kasunanan Surakarta melalui pemberitaan di media online lokal Solopos.com. Fokus pada analisis framing oleh Entman ini ialah pada penyeleksian isu dan penonjolan aspek-aspek dari realitas atau isu yang terjadi. Framing digunakan untuk menonjolkan atau memberi penekanan pada aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak (Mulyana dan Solatun, 2007).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang penulis tentukan ialah bagaimana konstruksi berita pada pemberitaan mediasi Karaton Kasunanan Surakarta oleh Solopos.com

periode tahun 2014 berdasarkan perangkat elemen framing oleh Robert N. Entman?.

Analisis framing merupakan suatu metode analisis media yang penelitiannya berasal dari teori konstruksi sosial yang terbilang masih baru. Teori framing memaparkan hasil dari realitas yang dibentuk oleh suatu media. Analisis framing merupakan salah satu metode analisis data yang digunakan untuk melihat bagaimana media massa seperti surat kabar ataupun televisi yang membingkai realitas untuk dimuat atau disiarkan sebagai berita (Herman dan Nurdiansa, 2010).

Studi tentang analisis framing telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Publik mengandalkan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di kawasan lokal, nasional dan bahkan di internasional. Ketergantungan pada media penting untuk mengatasi berita sebagai dasar narasi dan interpretasi. Fokus pada satu aspek dari suatu peristiwa tertentu dan menyajikannya kepada publik, media telah membentuk suatu realitas baru yang telah di konstruksi sesuai dengan formatnya. Kontruksi realitas berperan dengan membuat aspek-aspek tertentu dari cerita agar lebih menonjol. Frame media berfungsi membujuk publik untuk berpikiran sama seperti apa yang diinginkan oleh media itu sendiri (Carter, 2013, h. 1).

Framing pada dasarnya melibatkan pilihan dan arti-penting. Frame memilih beberapa aspek dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks, dengan cara seperti itu dapat untuk mengetahui definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral dan rekomendasi yang dijelaskan. Menurut Gamson (1992), biasanya frame mendiagnosa, mengevaluasi, dan menentukan titik penyelesaian (Entman, 1993, h. 52).

Peter L. Berger seorang Sosiolog Interpretatif, memperkenalkan konsep framing sebagai konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang teks berita dan media yang dihasilkannya dengan cara mereka sendiri. Berger dan Thomas Luckman dalam

tesis utamanya menjelaskan manusia dan masyarakat merupakan hasil dari produk yang dialektis, produk dinamis, dan plural yang berjalan terus-menerus. Bagi Berger, realitas itu dibentuk dan dikonstruksi, tidak dibentuk dengan cara ilmiah, maupun tidak diturunkan secara langsung dari Tuhan (Eriyanto, 2002).

Berger dan Luckman juga menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman 'kenyataan' dan 'pengetahuan'. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam fakta-fakta yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Bungin, 2008).

Menurut Robert N. Entman, frame sebagai proses seleksi yang menafsirkan makna tertentu. Framing merupakan bagaimana cara memilih serta menentukan aspek tertentu dari situasi yang menafsirkan suatu makna. Penafsiran makna dimaknai melalui narasi pada teks yang mendefinisikan makna yang saling terkait dengan penentuan masalah, analisis penyebab masalah, evaluasi moral pada makna yang terlibat serta penyelesaian masalah (Azpiroz, 2014, h. 78).

Robert N. Entman merupakan ahli yang menempatkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Menurutnya, konsep framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penyeleksian isu berhubungan dengan proses pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang akan diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek atau bagian dari isu dapat ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Sedangkan penonjolan aspek tertentu dari suatu isu, ialah aspek yang berhubungan dengan

penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2002).

Entman mengungkapkan terdapat sebuah perangkat framing untuk mengetahui bagaimana pembingkain yang dilakukan oleh media, serta untuk mengetahui bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Ada empat elemen yang dibagi oleh Entman dari perangkat framing sebagai berikut: (Eriyanto, 2002).

001. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Elemen framing yang pertama kali dapat dilihat. Elemen ini merupakan *mater frame* atau bingkai yang paling utama yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan, maka realitas yang terbentuk akan berbeda.

002. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Elemen framing yang membingkai siapa yang dianggap tokoh utama dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa dapat dipahami tergantung dari apa (*what*) dan siapa (*who*) yang dianggap menjadi sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda membuat penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda juga.

003. *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral)

Elemen framing yang dibuat untuk membenarkan atau memberikan argumentasi terhadap masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, maka diperlukan adanya argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

004. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan mana yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tergantung dari siapa dan apa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Elemen Framing Model Robert N. Entman	Unit Analisis
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: (Eriyanto, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat interaktif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menekankan masalah penelitiannya (Mulyana dan Solatun, 2007). Data yang digunakan merupakan data kualitatif. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan konstruksi realitas yang terjadi. Menggunakan analisis framing oleh Robert N. Entman yang merupakan pemberian pendefinisian masalah, memberikan penjelasan, mengevaluasi, serta merekomendasikan terhadap pemberitaan (Gaio, 2015, h. 453).

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lapangan (dokumentasi) (Mulyana dan Solatun, 2007). Data primer dalam penelitian ini adalah teks berita yang peneliti dapatkan dari surat kabar harian media online Solopos.com mengenai mediasi

konflik Karaton Kasunanan Surakarta selama periode tahun 2014. Peneliti menemukan 16 artikel berita mengenai mediasi Karaton Solo. Sedangkan data sekunder, ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Mulyana dan Solatun, 2007). Data sekunder yang digunakan ialah jurnal komunikasi dan buku-buku komunikasi yang dapat mendukung penelitian dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti mengamati langsung objek yang diteliti. Sedangkan metode dokumentasi bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif (Mulyana dan Solatun, 2007). Dokumentasi yang peneliti peroleh berasal dari pengumpulan data dan teori dari berbagai sumber, misalnya buku-buku, dan artikel berita pada surat kabar harian media online Solopos.com.

Objek penelitian ini adalah berita mediasi konflik Karaton Kasunanan Surakarta di surat kabar harian media online Solopos.com selama periode tahun 2014. Pemilihan tahun 2014 karena pada tahun tersebut mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah dilakukan untuk menyelesaikan dan mendamaikan konflik Karaton Solo. Validitas data menggunakan metode analisis data triangulasi, yakni menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris yang tersedia (Mulyana dan Solatun, 2007).

PEMBAHASAN

Peran media dalam krisis dapat menjadikan sumber informasi oleh publik. Publik akan mencari informasi lewat berita yang diterbitkan oleh media massa. Krisis yang terjadi di Karaton Kasunanan Surakarta merupakan dampak dari konflik yang belum dapat terselesaikan. Pemilihan informasi mengenai krisis di Karaton Solo yang dijadikan berita telah melewati proses

penyeleksian isu sesuai dengan karakteristik Solopos. Media massa memainkan peranan yang penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat setiap harinya. Media berfungsi sebagai penjaga gerbang. Media menentukan relevansi dan pentingnya kegiatan menurut media tertentu. Format di media ditentukan oleh media sendiri. Di setiap negara memiliki sistem pada media dan praktik jurnalistik yang berdampak pada isi berita. Media memiliki format dan karakteristik berdasarkan apa yang dikehendakinya. Apa yang dibaca, dilihat dan didengar melalui suatu media, merupakan hal yang sudah diubah sesuai dengan format media itu sendiri (Romenti dan Valentini, 2010, h. 383).

Konflik bisa diakhiri dengan jalan mediasi, mediasi merupakan jalan yang mempunyai tujuan dalam menyelesaikan konflik antara pihak yang bertentangan untuk mengakhiri konflik agar tidak mengganggu. Raymond dan Kegley (1985) menyatakan pendapatnya mengenai mediasi. Menurut mereka, kegiatan mediasi merupakan bentuk dari manajemen konflik dan resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang membantu penyelesaian konflik. Tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga biasanya: mengatur agenda penyelesaian konflik, melakukan komunikasi diantara pihak yang berselisih, serta menjelaskan posisi dan kedudukan masing-masing pihak yang terlibat dalam mediasi. Menurut Moore (1986) dalam Vukovic (2014), mediasi merupakan penekanan sifat dari kelanjutan uraian dan proses perundingan. Pihak ketiga yang dapat diterima harus tidak memihak dan bersikap netral. Mediasi menyediakan pihak ketiga diantara pihak yang berselisih sebagai proses untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Pihak ketiga mempunyai sifat yang netral agar dapat menyelesaikan konflik (Vukovic, 2014, h. 62). Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik pada Karaton Kasunanan Surakarta

karena kegagalan dari upaya rekonsiliasi. Dalam mediasi tersebut, penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator yang menjadi pihak ketiga. Namun keberadaan Roy Suryo sebagai mediator tidak diterima oleh semua pihak.

Menurut Paul Watson, media massa menganut konsep kebenaran yang bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Kebenaran sendiri ditentukan oleh media massa. Untuk itu pembaca harus memiliki kemampuan untuk menyaring sebuah berita agar menemukan kebenaran yang mendekati (Sobur, 2006). Seperti krisis yang terjadi di Karaton Surakarta mendapatkan perhatian dari media lokal Kota Solo, yakni Solo Pos. Pada situs online Solopos.com, pemberitaan mengenai konflik ini diberitakan sebagai sumber informasi untuk masyarakat.

Solo Pos berdiri di atas ideologi bahwa konflik ini harus diselesaikan dengan kontrol pemerintah sejak situasi sudah dalam krisis. Terkait dengan masalah budaya, Solo Pos tidak terfokus pada aspek itu. Alih-alih menggambarkan pendekatan budaya yang sudah ada di teks, seperti aspek simbolik yang dapat dilihat di banyak kalimat dan juga gambar. Dalam budaya Indonesia, orang suka duduk di sebelah orang, yang ia merasa dekat, yang berarti mereka memiliki kedekatan satu sama lain. Dalam kalimat, Solo Pos menyebutkan bahwa Gusti Tedjo dekat Gusti Dipo, dan juga di satu meja dengan Walikota Rudy dan Menteri Roy. Ini juga menekankan bahwa pesan menggambarkan dalam teks didukung oleh fakta nyata (Purworini, 2016, h. 12).

Upaya manajemen konflik dengan melakukan mediasi dimana mediator atau pihak ketiga mulai mengenali konflik untuk mempengaruhi pihak yang berkonflik, memberikan perubahan pada konflik, mengatasi konflik yang terjadi dan merubah hubungan pada pihak yang berkonflik. Menurut Frazier, mediator penting dalam merumuskan solusi yang tidak terkait

dengan hukum dan sebagai pihak ketiga memberikan atau mengusulkan solusi untuk mengakhiri konflik. Mediasi merupakan proses komunikasi yang membantu penyelesaian konflik melalui peran seorang mediator. Zartman dan Touval menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberpihakan mediator dan netralitas sebagai syarat untuk mendefinisikan mediasi yang sederhana namun bisa berguna sebagai usaha dalam negosiasi oleh pihak ketiga untuk menemukan solusi konflik yang tidak bisa ditemukan sendiri oleh pihak yang berkonflik. Peran mediator dalam proses negosiasi tidak hanya menyelesaikan masalah, namun dibalik itu semua mereka memiliki kepentingan tersendiri (Vukovic, 2014, h. 63).

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat, terutama keluarga karaton mengetahui bahwa media dapat mengkonstruksi sebuah realitas dari peristiwa yang terjadi agar menjadi pemberitaan yang sesuai dengan ideologinya dan juga agar lebih berhati-hati dalam menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu peristiwa pada media. Berita yang dimuat oleh media merupakan hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran wartawan yang sudah diolah sesuai dengan kepentingan dan ideologi media. Dalam penelitian ini menggunakan analisis framing. Analisis framing digunakan untuk menganalisis atau mengkaji pembingkai realitas oleh media. Pembingkai merupakan proses konstruksi, yakni realitas dimaknai dan didekonstruksi dengan cara dan makna tertentu (Mulyana dan Solatun, 2007).

Analisis data yang digunakan merupakan analisis data pada dokumen berita yang penulis kumpulkan dari harian media online Solopos.com. Dalam pendokumentasiannya, diperoleh 16 berita mengenai mediasi karaton selama tahun 2014. Pemilihan tahun 2014 karena pada rentan waktu tersebut, Solopos.com sering memberitakan mengenai mediasi karaton. Dalam analisis berita ini ditemukan beberapa masalah:

1. Adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Kasunanan Surakarta

a. *Define Problems*

Pada tahun 2012, konflik dualisme raja menemui kesepakatan dengan menempatkan K.G.PH Hangabehi sebagai PB XIII, dan K.G.PH Tedjowulan sebagai Maha Patih. Namun kerabat karaton yang semula pendukung Hangabehi menolak rekonsiliasi dan membentuk lembaga baru, yaitu Lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh G.K.R Wandansari atau Mbak Moeng.

Dalam teks yang disajikan oleh Solopos.com, menjelaskan kemunculan Roy Suryo sebagai mediator konflik terjadi karena adanya sentana dalem yang berusaha melupakan kesepakatan rekonsiliasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan Dewan Adat, karena inilah mantan Presiden SBY menunjuk Roy Suryo sebagai mediator (Solopos.com, 2014).

Beberapa kerabat Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang bergabung dalam Lembaga Dewan Adat menganggap Roy Suryo tak mempunyai kapasitas mengurus konflik internal Karaton Kasunan Surakarta (Solopos.com, 2014).

Dalam teks diatas, terlihat adanya penolakan terhadap Roy Suryo sebagai mediator konflik. Penolakan berasal dari kerabat Karaton Kasunanan Surakarta yang menganggap Roy Suryo tidak mempunyai kapasitas sebagai mediator konflik.

Selain lewat teks berita, penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik juga dimunculkan dalam judul berita "Aneh, Masalah Karaton Kok Diurusi Menpora"... (Solopos.com, 2014). Judul tersebut merupakan kutipan ungkapan dari adik ipar Raja PB XIII, KRMH Satriyo Hadinagoro. Dengan adanya penggunaan judul dari kutipan yang diungkapkan oleh kerabat keluarga karaton, menunjukkan memang adanya ketidaksetujuan dan penolakan terhadap Roy Suryo sebagai mediator konflik. Selain itu juga, penolakan Roy Suryo ditampilkan dalam kutipan teks berita:

"Aneh kalau masalah keraton diurusi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga [Menpora]. Dulu sudah benar diurusi Menteri Dalam Negeri, sehingga ini suatu kemunduran," ungkap adik ipar raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat PB XIII, KRMH Satriyo Hadinagoro, saat memberi keterangan pers sesuai haul PB XII di Sasana Handrawina, Sabtu (22/2/2014) (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks berita tersebut dapat terlihat bahwa pihak Karaton Solo sebenarnya sudah membenarkan tindakan penyelesaian konflik ini dengan penunjukkan Menteri Dalam Negeri sebagai mediator konflik. Namun, adanya Roy Suryo penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator konflik, dianggap sebagai suatu kemunduran dari usaha pemerintah dalam melaksanakan mediasi konflik ini.

b. *Diagnose Causes*

Penolakan Roy Suryo sebagai mediator dilatarbelakangi karena dia bukan anggota internal keluarga Karaton Kasunanan Surakarta, melainkan keturunan dari Pura Pakualaman Karaton Jogjakarta (Solopos.com, 2014). Hal ini dianggap bahwa Roy Suryo tidak memahami dan mengetahui masalah yang sebenarnya di karaton sehingga penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator ditolak oleh internal keluarga karaton.

Keterlibatan Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Solo menuai protes. Kerabat Karaton Kasunana Surakarta Hadiningrat yang tergabung dalam Dewan Adat menilai kedatangan Roy hanya membicarakan soal mobil (Solopos.com, 2014).

Teks berita diatas dengan judul "Tak Ada Rekonsiliasi, Roy Suryo Cuma Bicara Mobil", Solopos.com memunculkan adanya penilaian oleh Dewan Adat. Adanya penggunaan judul dan kutipan teks yang menunjukkan bahwa keterlibatan Roy Suryo tidak mendapat persetujuan dari Dewan Adat. Selain itu, Solopos.com memperlihatkan dalam kutipan teks pemberitaannya bahwa Roy Suryo tidak memahami persoalan konflik yang terjadi di Karaton Kasunanan Surakarta karena saat

pertemuan Roy Suryo hanya membicarakan mengenai mobil milik PB X dan partai. Seperti pada kutipan teks berita:

Ketika itu, papar dia, Roy tengah mencari referensi mengenai mobil Phaeton Benz 1894 milik mendiang PB X. Sebab mobil yang saat ini berada di Belanda itu dipercaya sebagai mobil pertama di Indonesia. "Jadi ketika itu memang tidak ada pembicaraan soal rekonsiliasi," kata Puger (Solopos.com, 2014).

Namun kehadiran Roy Suryo dalam mediasi dianggap tidak membicarakan mengenai konflik, melainkan membahas persoalan Partai Demokrat. Ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator konflik Karaton Solo dalam menyelesaikan konflik yang seharusnya terjadi.

Sementara itu, dari kubu Lembaga Dewan Adat, K.P. Eddy Wirabhumi, mengakui pihaknya sempat bertatap muka dengan Roy Suryo. Hanya, dia mengklaim pertemuan itu sebatas konsolidasi partai. Roy, Eddy dan Mbak Moeng merupakan kader Partai Demokrat. "Lebih banyak *ngomong* masalah partai," ujarnya (Solopos.com, 2014).

c. *Make Moral Judgement*

Dari analisis peneliti pada teks berita Solopos.com mengenai pemberitaan mediasi konflik Karaton Solo, adanya pihak-pihak yang masih bersikukuh dalam mempertahankan kepentingan dan pendapatnya mengenai mediasi konflik Karaton Kasunanan Surakarta. Seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah yang mengklaim telah turun tangan dalam penyelesaian konflik tersebut. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh kerabat Karaton Solo yang merasa tidak pernah diajak bicara mengenai persoalan konflik maupun mediasi. Seperti pada kutipan teks berita berikut:

Pemerintah pusat mengklaim telah turun tangan untuk menyelesaikan konflik di Karaton Solo itu. Para kerabat ini juga mengklaim tak pernah diajak bicara dalam mediasi yang dilakukan oleh Roy yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) (Solopos.com, 2014).

Namun tidak sejalan dengan kerabat Karaton Solo, Roy Suryo mengklaim bahwa dirinya telah berbicara dengan Dewan Adat. Ini ditampilkan oleh Solopos.com dalam artikel beritanya:

Roy Suryo saat ditemui wartawan di Solo, Jumat (21/2/2014), mengklaim telah berbicara dengan kedua pentolan kelompok yang menyebut diri Dewan Adat tersebut (Solopos.com, 2014).

Solopos.com dalam artikelnya menunjukkan adanya masing-masing pihak yang terlibat dalam mediasi konflik Karaton Solo yang mempertahankan pendapatnya. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan penyelesaian konflik dengan cara mediasi tidak berlangsung dengan baik.

d. *Treatment Recommendation*

Dalam menyelesaikan permasalahan konflik karaton yang terjadi, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikannya dengan baik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan konflik ini yakni menggelar pertemuan antara Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PB XIII Hangabehi dan Maha Patih Tedjowulan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh K.P Bambang Pradotonagaro dalam teks berita yang disajikan oleh Solopos.com:

"Tujuan bertemu dengan SBY itu merupakan bagian dari tahapan rekonsiliasi. Mungkin, pertemuan dengan SBY itu diharapkan pemerintah pusat langsung turun tangan dan betul-betul menyelesaikan konflik karaton. Proses rekonsiliasi konflik karaton ini berjalan cukup lama sejak pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dan SBY-Budiono," tegasnya (Solopos.com, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa Solopos.com ingin menampilkan bagaimana pihak-pihak yang menolak Roy Suryo sebagai mediator. Pemilihan narasumber yang di pilih oleh Solopos.com sudah cukup menunjukkan bahwa adanya kerabat karaton yang tidak setuju dengan penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator konflik.

Define Problems	Roy ditolak sebagai mediator konflik
Diagnose Causes	- Bukan dari internal keluarga karaton - Tidak mengetahui masalah yang sebenarnya
Make Moral Judgement	Internal keluarga karaton bersikukuh dengan pendapatnya
Treatment Recommendation	Pemerintah harus tetap melanjutkan rencana dalam mendamaikan konflik karaton

2. Adanya pelemahan terhadap budaya karaton dalam pelaksanaan mediasi

a. Define Problems

Dari analisis teks berita yang disajikan oleh Solopos.com mengenai mediasi yang di lakukan oleh Roy Suryo dan pemerintah sebagai fasilitator, terdapat temuan dari teks berita yang dianalisis mengenai pelemahan budaya. Hal ini bisa terjadi apabila membahas permasalahan yang berhubungan dengan karaton akan dikaitkan dengan aspek budaya.

Pelemahan budaya ini terjadi didalam pelaksanaan mediasi, karena adanya pihak-pihak yang tidak mengakui sepenuhnya keberadaan Dwi-Tunggal. Seperti pada teks berita yang berjudul "*Roy Suryo: Rekonsiliasi Karaton Solo Setelah Pilpres*", Roy Suryo mengungkapkan adanya pihak-pihak yang tidak mengakui keberadaan dwi - tunggal tersebut.

Ketika ditanya perwakilan keraton dalam rekonsiliasi tersebut, Roy mengaku belum mengetahui pasti. "Anggota keluarga besar karaton pro dwi-tunggal sebelumnya sempat bertemu Presiden. Begitu pula dengan yang tak mengakui keberadaan dwi-tunggal. Presiden sudah menangkap sinyal masing-masing kubu. Ini permasalahan waktu saja," ungkapnya (Solopos.com, 2014).

Dari analisis teks berita yang disajikan oleh Solopos.com dengan mengutip pernyataan Roy Suryo tersebut, terlihat adanya pelemahan kebudayaan di Karaton Kasunanan Surakarta. Hal ini ditujukan dengan adanya pihak-pihak yang tidak mengakui keberadaan Dwi-Tunggal.

b. Diagnose Causes

Pelemahan hakikat PB XIII sebagai Raja sudah dirasakan oleh PB XIII Hangabehi itu sendiri. Pada kutipan teks berita Solopos.com, memperlihatkan adanya pelemahan kekuasaan PB XIII sebagai Raja. Raja mengungkapkan pelemahan kekuasaannya pada Mantan Presiden SBY.

PB XIII menceritakan kebebasan dirinya sebagai sosok Raja terganggu karena sebagian besar wilayah Karaton Solo sudah dikuasai oleh Lembaga Dewan Adat Karaton yang dipimpin oleh adiknya sendiri yakni G.K.R. Wandansari atau Mbak Moeng (Solopos.com, 2014).

Sebagai seorang Raja, seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat menguasai wilayah kekuasaan Raja. Dalam teks tersebut memperlihatkan adanya pihak lain yakni Lembaga Dewan Adat yang menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Raja sehingga Raja merasa terganggu. Hal ini juga menunjukkan adanya pelemahan hakikat PB XIII sebagai Raja Karaton Kasunanan Surakarta.

c. Make Moral Judgement

Pelemahan budaya yang terjadi dikarenakan adanya penurunan hakikat dari seorang Raja, yaitu sebagai pemimpin. Solopos.com dalam teks beritanya menyajikan pernyataan dari Roy Suryo yang menyebutkan:

Menurut Roy, Mbak Moeng telah mempersilakan PB XIII bertemu dengan Presiden. Namun, Mbak Moeng memberi syarat PB XIII harus datang sendiri di pertemuan itu. "Melihat kondisi kesehatan, Sinuhun harus tetap ditemani. Sinuhun mengalami kendala dalam berkomunikasi sehingga perlu ada yang menjelaskan maksud pembicaraannya. Nanti saya sendiri yang menemani saat bertemu Presiden," ucapnya (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks tersebut menyebutkan bahwa "*Mbak Moeng mempersilakan PB XIII bertemu dengan Presiden*". Hal ini

menunjukkan adanya pelemahan hakikat PB XIII sebagai Raja. Hakikat Raja pada umumnya adalah semua keputusan ada di tangan seorang Raja. Namun pada teks tersebut memperlihatkan Raja di atur oleh pihak lain, yakni Mbak Moeng. Serta adanya surat dari PB XIII untuk Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan mengenai dirinya sebagai Raja merasa terganggu. Seperti yang dikutip dalam teks berita:

Surat bernomor 03/PBXIII/II/2014 tertanggal 23 Februari 2014 itu berisi pernyataan sikap dan permohonan perlindungan hukum serta bantuan keamanan atas kepemimpinan, kewibawaan, dan keselamatan diri S.I.S.K.S. Paku Buwono XIII dan keluarga besar Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Surat yang terdiri atas enam lembar itu ditandatangani Paku Buwono XIII dan berstempel beraksara Jawa. Salinan surat tersebut juga diterima *Solopos.com* lewat email, Kamis (6/3/2014) siang (*Solopos.com*, 2014).

Adanya surat tersebut menandakan bahwa PB XIII merasa dirinya sebagai seorang Raja terancam. Hal ini menunjukkan adanya pihak lain yang mencoba mengganggu posisi dirinya sebagai seorang Raja. Nilai moral yang dapat diambil dari pelemahan terhadap kebudayaan karaton yaitu Raja yang seharusnya dianggap sebagai pemimpin tertinggi pada kenyataannya tidak dianggap sebagai seorang Raja yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas wilayah kekuasaannya.

d. *Treatment Recommendation*

Dalam teks yang disajikan oleh *Solopos.com*, adanya pelemahan budaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengakui sepenuhnya keberadaan PB XIII sebagai Raja karaton. Dalam teks tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu, mengupayakan mengembalikan kekuasaan PB XIII Hangabehi sebagai Raja. Hal ini ditunjukkan oleh *Solopos.com* lewat judul teks berita.

- PB XIII Bertemu SBY, Otoritas Karaton Surakarta segera Kembali Tegak (*Solopos.com*, 2014).
- PB XIII Curhat ke Presiden, SBY Siap Bantu (*Solopos.com*, 2014).
- SBY Fokus Kembalikan PB XIII ke Singgasana (*Solopos.com*, 2014).
- SBY Selesaikan Konflik Karaton Tunggu Pemilu (*Solopos.com*, 2014).

Salah satu langkah yang dilakukan oleh PB XIII untuk menyelesaikan konflik didalam keluarga karaton dengan mengirim surat untuk SBY. Surat tersebut berisikan mengenai kekuasaannya yang terganggu oleh pihak lain. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya tindakan untuk mengembalikan fungsi dari seorang Raja. Pemerintah selaku fasilitator mediasi konflik, menjamin dengan mengakui otoritas tertinggi karaton ada pada PB XIII bukan pihak lain. Seperti yang dikutip dalam teks berita *Solopos.com*:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut Roy, telah mengatakan bahwa rekonsiliasi ini diharapkan selesai setelah pemilu dan sebelum acara Jumenengan 25 Mei 2014 mendatang, Roy menambahkan, pemerintah memberikan jaminan secara tegas bahwa mengakui otoritas tertinggi Karaton Solo ada di bawah PB XIII (*Solopos.com*, 2014).

Ini menunjukkan bahwa pelemahan kekuasaan PB XIII Hangabehi sebagai Raja hanya dilakukan oleh pihak lain, sedangkan pemerintah mengakui PB XIII sebagai Raja dan pemegang otoritas tertinggi di Karaton Kasunanan Surakarta.

<i>Define Problems</i>	Pelemahan kebudayaan pada Karaton Kasunanan Surakarta
<i>Diagnose Causes</i>	- Adanya kekuasaan selain Raja PB XIII Hangabehi - Pelemahan PB XIII sebagai Raja Karaton Kasunanan Surakarta
<i>Make Moral Judgement</i>	Pengendalian seorang Raja sebagai pemimpin karaton
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah tetap fokus mengembalikan otoritas Raja

3. Adanya rasa ketidakpercayaan terhadap mediasi yang difasilitasi pemerintah

a. *Define Problems*

Dalam menjelaskan beberapa temuan dari teks berita di Solopos.com mengenai rekonsiliasi Karaton Kasunanan Surakarta, frame selanjutnya yang ditemukan oleh penulis yakni adanya rasa ketidakpercayaan mengenai mediasi. Dari teks berita Solopos.com mengenai mediasi, ditemukan adanya ketidakpercayaan dari eksternal keluarga karaton terhadap mediasi.

Solopos.com, SOLO — Kalangan DPRD Kota Solo melalui Ketua Y.F. Sukasno pesimistis dengan ikhtiar Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kubu Paku Buwono XIII enggan menanggapi pernyataan wakil rakyat itu (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks berita tersebut terlihat adanya rasa ketidakpercayaan terhadap usaha Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik Karaton Solo. Selain itu, ketidakpercayaan juga di tunjukkan oleh Heri Priyatmoko yang merupakan Sejarawan Muda Kota Solo.

Sikap serupa Sukasno juga ditunjukkan sejarawan muda Kota Solo, Heri Priyatmoko. Menurutnya, langkah Presiden SBY turut berikhtiar menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Karaton Solo sekadar melakukan pelarian irasional pada akhir masa jabatannya (Solopos.com, 2014).

b. *Diagnose Causes*

Temuan dari teks berita oleh Solopos.com, yakni adanya ketidakpercayaan yang berasal dari eksternal keluarga Karaton Kasunanan Surakarta. Dalam teks berita, ketidakpercayaan tersebut berasal dari Y.F. Sukasno selaku Ketua DPRD Kota Solo.

Solopos.com, SOLO — Ketua DPRD Solo Y.F. Sukasno menuding upaya Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) menduga

konflik di lingkungan Karaton Solo dengan pendekatan kekuasaan bakal berdampak pada konflik yang berkepanjangan. Sebelumnya, Sukasno sejatinya juga membuktikan ketidakmampuan wakil rakyat Solo menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks tersebut, ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai keberhasilan SBY dalam menyelesaikan konflik. Sejalan dengan Sukasno, Heri Priyatmoko juga mengungkapkan untuk apa Mantan Presiden SBY mengurus konflik karaton yang dianggap sebagai masalah sepele.

“Kalau mau rasional, sebenarnya banyak masalah lain di Indonesia seperti korupsi, terorisme, dan kemiskinan yang lebih penting diselesaikan. Namun kenapa SBY mau menyempatkan diri pada problem ‘remeh temeh’ karaton?,” ujarnya saat berbincang dengan *Solopos.com*, Senin (Solopos.com, 2014).

c. *Moral Judgement*

Dari kutipan judul berita yang dimuat oleh Solopos.com “*Ketua DPRD Pesimistis, Kubu PB XIII Emoh Tanggapi*” (Solopos.com, 2014), terlihat adanya rasa ketidakpercayaan dari eksternal keluarga karaton tidak ditanggapi oleh kubu PB XIII Hangabehi. Sedangkan, Solopos.com menyajikan kutipan teks berita dari judul tersebut, kutipan tersebut berisi pernyataan dari Wali Kota Solo FX Rudy yang menyebutkan seharusnya kedua kubu yang berseteru seharusnya mematuhi mandat yang dari SBY selaku Presiden RI pada saat itu.

Menurut Rudy, kedua kubu berseteru harusnya patuh pada mandat yang diberikan SBY nantinya.

“Presiden *kan* pemimpin tertinggi. Apapun keputusannya harus ditaati,” ujarnya (Solopos.com, 2014).

d. *Treatment Recommendation*

Solopos.com menuliskan upaya bantuan yang dilakukan oleh Rudy selaku Wali Kota Solo. Upaya tersebut merupakan salah satu

bagian dari penyelesaian konflik. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, pelestarian karaton sebagai cagar budaya tetap berlangsung.

Rudy menambahkan bantuan hibah kepada keraton bakal bergulir lagi pascakeputusan penyelesaian Presiden. Tahun ini, pihaknya telah menyiapkan dana Rp300 juta untuk pelestarian karaton sebagai cagar budaya. Sebagai informasi, beberapa tahun terakhir dana bantuan pemerintah tak cair lantaran konflik internal. "Tidak akan disalurkan sebelum ada kesepakatan rukun. Namun untuk biaya listrik tiap tahun tetap kami berikan," tandasnya (Solopos.com, 2014).

Solopos.com juga mempublikasikan pernyataan dari Sukasno yang memberikan solusi bagi penyelesaian konflik karaton.

Menurut Sukasno, akar persoalan konflik karaton itu sangat kompleks dan rumit. Tetapi, Sukasno menegaskan bukan berarti konflik itu tidak bisa diselesaikan. Dia berpendapat konflik karaton akan bisa diselesaikan dengan catatan harus mengetahui akar permasalahannya. Sukarno menyampaikan dua hal yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik keraton itu, yakni penyelesaiannya membutuhkan waktu dan kesabaran (Solopos.com, 2014).

Define Problems	Ketidakpercayaan terhadap mediasi
Diagnose Causes	Eksternal keluarga karaton tidak percaya mediasi
Make Moral Judgement	Mematuhi mandat Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Treatment Recommendation	- Pemberian bantuan hibah - Penyelesaian dengan mengetahui akar masalahnya

SIMPULAN

Konflik yang terjadi di Karaton Kasunanan Surakarta merupakan permasalahan yang telah terjadi sejak lama. Adanya pihak yang menolak dengan hasil keputusan Rekonsiliasi tahun 2012 menimbulkan persoalan baru, yakni dengan munculnya Dewan Adat.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi yang transparansi (Han, 2010, h. 26). Komunikasi yang transparan antar pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Karaton Solo.

Menurut Bercovitch dan Gartner (2009), mediasi merupakan proses sukarela. Sifat yang dimiliki mediator haruslah berimbang, bisa diterima oleh semua pihak yang berkonflik dan bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berkonflik. Netralisasi pada mediator merupakan hal yang penting. Maoz dan Terris juga menjelaskan bahwa mediator harus memiliki standar dalam menyelesaikan konflik. Mediator harus dapat dipercayai oleh semua pihak yang berkonflik, punya kompetensi dalam menyelesaikan konflik, serta memahami konflik yang sedang terjadi (Vukovic, 2014, h. 65). Mediasi merupakan salah satu proses dimana pihak ketiga mempengaruhi pihak yang berkonflik agar dapat menemukan jalan keluar dan menyelesaikan konflik (Wang, 2011, h. 607).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik, adanya pelemahan terhadap budaya karaton dalam pelaksanaan mediasi, dan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap mediasi yang difasilitasi pemerintah.

Aktor utama dalam konflik dianggap sebagai penyebab konflik terjadi (Anne dan Marie, 2010, h. 58). Pada konflik mediasi Karaton Solo, keberadaan Roy suryo dianggap sebagai suatu kemunduran dalam proses mediasi. Sehingga proses mediasi berlangsung dengan tidak semestinya dikarenakan adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Adat. Roy Suryo dianggap tidak mempunyai kapasitas dalam penyelesaian konflik ini. Roy Suryo merupakan keturunan dari Paku Alaman yang merupakan Catur Sagatra, ialah pendiri Mataram Islam dari Karaton Yogyakarta. Hal ini dianggap bahwa Roy Suryo tidak mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi didalam Karaton Solo. Sehingga terjadi

penolakan terhadap Roy Suryo sebagai mediator konflik.

Konflik mempunyai peran dalam permainan membangun suatu kepercayaan (Chen dan Ayoko, 2012, h. 27). Konflik yang terjadi dalam Karaton Solo dapat menjadi suatu permainan dalam membangun kepercayaan pemerintah daerah yang sempat hilang. Dari proses mediasi ini diharapkan mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah kembali. Seringnya interaksi dan berkomunikasi antar anggota dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih didalam organisasi (Han, 2010, h. 23). Ketidakpercayaan pemerintah daerah dengan proses mediasi ini dapat diminimalisirkan dengan adanya komunikasi dan interaksi antar pihak-pihak yang terlibat.

Solopos merupakan salah satu media surat kabar yang ada di Kota Solo. Kegunaan dari media ialah menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dikemas dengan bentuk berita. Dalam pemberitaannya, media memiliki pesan tersendiri dalam berita yang dipublikasikannya. Hal ini dikarenakan media adalah pengantar pesan (Anne dan Marie, 2010, h. 53). Seperti yang terjadi pada Karaton Solo. Konflik yang terjadi di Karaton Solo menjadi konsumsi pihak media untuk pemberitaannya. Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi.

Dari temuan tersebut, media online Solopos.com melakukan konstruksi berita pada pemberitaan mengenai mediasi dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik Karaton Kasunanan Surakarta. Solopos.com merupakan surat kabar media online yang turut mengiringi jalannya proses mediasi. Pemberitaan mengenai mediasi digunakan Solopos untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa media ini dekat dengan karaton dan pemerintah Kota Solo. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat.

Pemberitaan yang dilakukan oleh Solopos.com bertujuan memberikan informasi kepada

masyarakat bahwa pemerintah ikut andil dalam menyelesaikan konflik di Karaton Solo. Media Solopos.com sering memberitakan bagaimana usaha pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Roy Suryo sebagai mediator konflik untuk menyelesaikan konflik karaton yang sudah lama terjadi.

Dari 16 artikel berita mengenai proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, kecenderungan Solopos.com dalam memberitakan mengenai mediasi konflik Karaton Solo lebih berpihak kepada pemerintah. Namun hal ini tidak diperlihatkan secara langsung dalam artikel beritanya. Pemilihan narasumber sebagai informan juga menunjukkan adanya kecenderungan memihak pemerintah, misalnya sering memunculkan narasumber dari pemerintah, yakni Roy Suryo.

Namun dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, penelitian ini menggunakan hanya satu media massa lokal, yakni Solopos. Selain itu juga pada penelitian ini menggunakan harian media online, bukan media cetak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya di harapkan menggunakan lebih dari satu media massa lokal maupun nasional yang berguna untuk menemukan perbedaan konstruksi berita mengenai topik permasalahan yang sama. Selain itu juga, pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan analisis framing dari ahli selain Robert N. Entman.

Dalam pengelolaan pemberitaan, media surat kabar harian Solopos harus mempertahankan ideologinya untuk memproduksi dan mempublikasikan berita sesuai dengan fakta dan realita yang diberikan oleh narasumber. Karaton Surakarta harus teliti dalam memberikan informasi kepada media massa. Sikap ini diperlukan agar berita yang dipublikasikan sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

Para pembaca diharapkan mampu memilih dan bersikap kritis terhadap surat kabar dan berita yang dibacanya. Hal ini dikarenakan media surat kabar harian melakukan konstruksi realitas sesuai dengan ideologi

yang dipertahankannya. Hal ini dilakukan agar berita yang dipublikasikan sesuai dengan tujuan dan ideologi surat kabar harian.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Anne, M., & Marie, N. (2010). THE COMMUNICATION PROCESS IN POST-CONFLICT PERIOD. *BULETIN S T I I N T J I F I C*, 1(1), 51 – 60.
- Ardiansyah, Arief Sofyan. (2012), Konstruksi Seksualitas Perempuan di Majalah Men's Health, *Jurnal Komunikator*, 4(1), 80-92
- Azpiroz, M. L. (2014). Framing and political discourse analysis: Bush's trip to Europe in 2005. *Observatorio*, 8(3), 75–96.
- Carter, M. J. (2013). The Hermeneutics of Frames and Framing: An Examination of the Media's Construction of Reality. *SAGE Open*, 3(2), 1–12. <http://doi.org/10.1177/2158244013487915>
- Chen, M. J., & Ayoko, O. B. (2012). Conflict and trust : the mediating effects of emotional arousal and self-conscious emotions. *International Journal of Conflict Management*, Vol. 23 No(1), 19–56. <http://doi.org/10.1108/10444061211199313>
- Cmeciu, C., Coman, C., Patrut, M., & Teodorascu, F. (2015). News media framing of preventable crisis clusters. Case study: Newborn babies killed in the fire at a romanian hospital. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, (44), 42–56.
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176. <http://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
- Entman, R. N. (1993). Framing : Toward Clarification of A Fractured Paradigm. *Northwestern University*, 43(January). <http://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fuller, R. P., & Rice, R. E. (2014). Lights, camera, conflict: Newspaper framing of the 2008 Screen Actors Guild negotiations. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 91(2), 326–343. <http://doi.org/10.1177/1077699014527455>
- Gaio, A. M. S. M. C. D. (2015). ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK VS POLRI DI VIVANEWS.CO.ID DAN DETIKNEWS.COM. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No(3), 451–455.
- Han, G. H. (2010). Team identification, trust and conflict: a mediation model. *International Journal of Conflict Management*, Vol. 21 No(2001), 20 – 43. <http://doi.org/10.1108/10444061011016614>
- Hasani, K., Boroujerdi, S. S., Sheikhesmaeili, S., & Aeni, T. (2014). Identity of organizational conflict framework: Evaluating model factors based on demographic characteristics in Iran. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 7(5), 1013–1036. <http://doi.org/10.3926/jiem.1061>
- Heath, R. L. and H. D. O. (2009). *Handbook of Risk*. Routledge. <http://doi.org/10.1007/978-94-007-1433-5>
- Herman, A., & Nurdiansa, J. (2010). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, (Mei - Agustus 2010), 154–169.
- Mahlafi, M. I. (2013). REKONSILIASI KERATON DALAM KONSTRUKSI MEDIA (Studi Analisis Framing Pada Kasus Rekonsiliasi Keraton Kasunanan Surakarta Dalam Surat Kabar Solopos Edisi Bulan Mei – Juni 2012). *Jurusan Ilmu Komunikasi*, 1 – 12.
- Purworini, D. (2016). The Pursuing of Government Policy: How Online Newspaper Frames the Internal Conflict in Karaton Surakarta, 3(PB XIII), 1 – 15.
- Romenti, S., & Valentini, C. (2010). Alitalia's crisis in the media – a situational analysis. *Corporate Communications: An International Journal*, 15(4), 380–396. <http://doi.org/10.1108/13563281011085493>
- Vukovic, S. (2014). International mediation as a distinct form of conflict management, 25(1), 61–80. <http://doi.org/10.1108/IJCMA-02-2012-0015>
- Wang, J. (2011). The mediation role of trust in knowledge sharing architectural design teams, (71202101). <http://doi.org/10.1108/ECAM-05-2011-0044>
- Widiastuti, T. (2012). Sebuah konflik antarbudaya di media. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 1 No., 147–170.
- Wolf, D. De, & Mejri, M. (2010). Case study crisis communication failures : The BP case study. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 2(2), 48–56. Retrieved from <http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/165989/1/BP-CRISIS-IJAME.pdf>

BUKU:

- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana.

-
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Mulyana, D., dan Solatun. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sobur, A. (2006). *ANALISIS TEKS MEDIA Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

WEBSITE:

www.solopos.com

www.liputan6.com



Narrative Analysis of Maluku Conflict in The Film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku"

Abstrak

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mencatat bahwa 75% konflik besar di dunia dipicu oleh keberagaman budaya. Sebagai negara multicultural, Indonesia berpotensi tinggi mengalami konflik budaya. Salah satu konflik budaya terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah Konflik Maluku. Konflik tersebut telah diceritakan kembali dalam sebuah film berjudul "Cahaya dari Timur: Beta Maluku". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Konflik Maluku dinarasikan dalam film Cahaya dari Timur: Beta Maluku?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti memilih analisis naratif Tzvetan Todorov. Dia berpendapat bahwa narasi tidak bersifat datar, melainkan terdiri dari 5 babak yang meliputi kondisi ekuilibrium, munculnya gangguan, kesadaran akan munculnya gangguan, upaya memperbaiki gangguan, dan ekuilibrium baru. Dengan membagi narasi film kedalam 5 level, penelitian ini menemukan perbedaan kondisi pada level ekuilibrium. Seringkali, ekuilibrium dimulai dengan kondisi seimbang, tetapi film ini dimulai dengan penuturan konflik. Selain itu, konflik Maluku juga diposisikan sebagai latar belakang cerita.

Kata kunci: Narasi Konflik, Film.

Abstract

UN (United Nation) notes that 75% of major conflicts in the world are caused by cultural diversity. As multicultural country, Indonesia has high potential for cultural conflict. One of the biggest conflicts that ever occurred in Indonesia is Maluku conflict. This conflict had been retold in the film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku". The research question is "How is the Maluku conflict narrated in the film Cahaya dari Timur: beta Maluku?". To answer the question, the researcher chooses the narrative analysis from Tzvetan Todorov. He argues that narrative is not flat. It consists of certain levels (equilibrium, disruption, recognizing the disruption, an attempt to the damage, and equilibrium). By dividing film narrative into five levels, this research finds the different condition in equilibrium level. Oftentimes, equilibrium is started by balance condition, but this film is started by conflict. Besides that, Maluku conflict is positioned as the background story.

Keyword: Narrative, Conflict, Film.

INTRODUCTION

Cultural diversity is one of the causing factors of disintegration. The diversity in this case includes race, ethnics, and religion differences. Base on the data which is reported by *Tempo.co*, UN (United Nation) notes that 75% of major conflicts in the world are caused by cultural diversity. In 2010, Central Bureau of Statistic notes that Indonesia has 1.128 ethnics which are spread in more than 17.000 islands. As a multicultural country, Indonesia has a high potential of cultural conflict ("Konflik yang Dipicu oleh Keberagaman Budaya Indonesia," 2015).

Some of cultural conflicts occurred in Indonesia. One of the biggest conflicts that ever occurred in Indonesia is Maluku Conflict. Maluku Conflict is a clash between Moslem and Christian that occurred in 1999-2004. The conflict killed about 4000 people and become the worst memories of people in Maluku. There are many resources shows

the causes of the conflict. One of them is a government journal which is published by UNDIP (Diponegoro University) in 2013. This journal, claims that Maluku Conflict is not only triggered by religion differences but economic and politic factors (Krisandi, Ernita, Budi Setyono, 2013).

Although Maluku Conflict had otherwise reconciled, it may recur. Base on *the Centre for Humanitarian Dialogue* data in 2011, Buchanan (2011) reports that Maluku Conflict has resulted two declarations of peace named Malino I in December 2001 and Malino II in February 2002. Unfortunately, the disturbance occurred six times during 2002 to 2004. One of the disturbances occurred in Ambon and killed 40 people (Buchanan, 2011). Base on the report of KKBB (Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) in 2013 which is published by *Setara Institute*, there are 222 violations of religion freedom in Indonesia and two times in Maluku during 2013. In January 28 2013, the threat of bombing occurred in Katedral Keuskupan Amboina Church building. In January 26 2013, violations of worship occurred in Dian Kasih Church (Halili, 2014).

In 2014, Maluku Conflict is retells in film "*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*". The film, which is directed by Angga Sasongko, tells about some people who live in Maluku Conflict. The main character tries to find the peace trough football. Although this film tells about the bad memories of Maluku, the society had given a positive response. The viewers of this film reach 16.000 a day in Indonesia (Mayaut, 2014). The aim of this film production is promoting Ambon city and strengthening the integration of Maluku after conflict. It was stated by Glen Fredly as the producer and Richard Louhunapessy as the Mayor of Ambon ("*Cahaya dari Timur: Beta Maluku Promosikan Ambon*," 2014). Thus, it becomes an interesting point of this research that film is used to inspire peace.

Actually, besides "*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*", there is another film that convey the peace through the film content. The title

is "*Di Timur Matahari*". This film tells about the condition of society in Papua. It tells about the war between ethnic and killed each other. The reason why the researcher prefer to see the narration of Maluku Conflict in the film "*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*" is because this film is based on true story. Every character in this film is real.

Film "*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*" can be categorized in the feature film. According to Elvinaro (2009) feature film contains story and usually showed in the cinema. The story in feature film can be a fiction story or true story which have modified. If the film tells about history, it should be made accurately and has a positive contain (Elvinaro, 2009). Film "*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*" contains true story which has been modified by film makers. The story is about Sani Tawainella who wants to live regardless of the conflict situation in Maluku. The story of Sani Tawainela and the football team is a true story.

As a mass media, film able to send message to the viewer largely and effectively. In mass communication theory, McQuail (2011) argues that film is able to reach a large population quickly even in rural areas. Besides that, the scene in the film is seen so real. Therefore film is able to influence the emotion (McQuail, 2011). This issue matter of this movie part of mass media product has an important contribution in culture. Media have an important contribution in maintaining the existence of culture. When a professional mass media produce the content of the message, which can be seen, read, heard, through film, television, radio or another mass media actually, they are constructing, sharing, and maintaining the culture (Baran, 2012). In film "*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*", there are several scenes which are representing the dutifully son. Through the scene, film is educating the audience how to be a dutifully son. The example in the film is Salembe. He always

helps his mother sell fishes before going to school. As the purpose of film "Cahaya dari Timur", it is shown the scene which is expressing the peace and harmony. One of the scenes in the film is the cooperation between Moslem and Christian collecting money for Maluku football team.

According to Effendy in Elvinaro (2009), there are three functions of media. That is *giving information*, *educating*, and *persuading*. *Giving information* means media can give some information toward reader, listener, or viewer. Media can fulfill the information needs which are compatible for the audience. *Educating* means mass media can present educational things. Unlike other media, film often delivers the educational message which can repair the condition for better society. *Persuading* means mass media especially film, has a competence to persuade and inspire people. For example, after watching film "Cahaya dari Timur", the relation between people in Maluku will be more harmony (Elvinaro, 2009).

Berger and Luckmann divide the social reality into three parts. *Firstly*, objective social reality is a reality which is found in the daily life and can be received without verifications. For example: reality which is seen as a fact, such as age, salary, and education. *Secondly*, symbolic social reality is forms of symbolic from objective social reality. The reality is known by society through artworks, fictions, and media content. Although media have tried to copy and interpret the real reality, the symbolic social reality in media and the real reality are still different. *Thirdly*, subjective social reality is the reality which is created inside of the audience. This reality came from objective reality and symbolic reality. Subjective reality is a reality which attends in forms of individual consciousness (Fachruddin, 2015).

Telling a true story in a film does not mean presenting a reality. Although the incident

in the film was made obviously, it is just a social symbolic reality. Because, narrative does not tell a whole of events, but the creator will select and arrange the events to make a dramatic effect. Therefore, it is possible for the creator to send an ideology message through film narration. It is also happened in film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*. Maluku Conflict which is represented in the film is not the reality of real conflict. This reality is contained in the fiction and contains of the media which is tried to create the story obviously with the real.

Nichols (1981) in Thoyibi (2015) argues that film roles as iconic representation that is established through metonymy relation between pictures, verbal code and sound, to result the text which contains from ideology. In the research toward Jewish film, Thoyibi also claims that the Jewish film always presents their identity. Through the identity, the Jewish films present their ideology. It shows from the symbol in picture, verbal code and textual system. (Thoyibi, 2015).

Film has the ability to construct the reality. As well as historical film which wants to construct the reality of history, film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku" also wants to construct the reality of Maluku conflict that ever occurred. Although both of them have the different genre, it is possible to construct the reality. The reason is film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku" based on true story. Therefore, the character and the event in the film are really occurred.

Research toward historical film by Williem Hesling, shows that the reality in a film is closely related to narrative realism. Unfortunately, the narrative reality oftentimes misleads the *objectivation* of reality. In this case, the *objectivation* of reality will influence the perspective of Maluku conflict. Reading the event of Maluku conflict by textual document literature will result the *objectivation*, based on the own understanding. It will differ by reading the Maluku

conflict in film literature. The tendency of conflict perspective will be influenced by the understanding of filmmaker (Hesling, 2001).

Implicitly, film has its own agenda which represent through the symbol mechanism in the form of content, message, sound and dialog. It will be injected in audience's mind. Therefore, film has ability to direct and lead audience into a certain occurrence. It makes film becoming the highest potential to insert the elements of education, social value, historical and culture knowledge on its contain. But, films with history or true story as the background of film are not always accurate. The reality and reality construction in film may be opposite (Eko & Susanto, 2015).

The reality of Maluku conflict is constructed in the film narrative. Gerrard Gannette on Eriyanto (2013) said that narrative is a representation of events. Therefore, conflict narrative in this research will be focused in the structure of event which is related to the Maluku conflict. Narrative is a phase when dramatizes is built by selecting and arranging events in causal relation (Eriyanto, 2015).

Through a theoretical approach the researcher tries to define film in different perspective in producing meaning. In this case, film is considered as a language that has potential to represent the reality and produce meanings. But it is not the copy of the representation. It is a form which has resemblance in the real world, and always in present space and time. The dramatization of reality in film is so vivid, and makes the audience confuse with the reality itself (Rivera-betancur, 2010).

In a film narrative, there should be an essential factor which is represented. In previous research toward Indian film PK (PeeKay), religion as an essential factor is represented through character, place, events, wedding party, and so on. The research also argues that cinematic narrative effectively

uses symbolism and even stereotype. In this case, Maluku conflict also will be seen through the narrative and cinematic narrative to see how the stereotype conflict is narrated through symbolism in this film (Qadri, 2016).

Base on the research background, the research question is "how is Maluku conflict narrated in the film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku". There are many cultural conflicts in Indonesia which have not appeared in film. The researcher hopes that the result of this research will inspire the film maker to use cultural conflict story in film. This story is used not only to see the bad finance, but to inspire and educate such as how important the peace. The researcher also hopes that this research will enrich the knowledge about film narration in communication field.

RESEARCH METHOD

Research "Narrative Conflict in Film" includes in qualitative research. If the quantitative research uses the numeric data, the qualitative research uses words and pictures as the data. Denzim and Lincoln in Neuman (2006) said that qualitative research is begins with self assessment and reflection of themselves through the context of socio-histories. Therefore, it will take a high sensitivity to the position of researcher in society (Neuman, 2006).

This research uses constructivism approach. Charmaz in Bazeley (2013) said that constructivist learning how and why people (research subjects) construct meaning and action in certain institutions. Constructivism approach is used to find out how the construction of the Maluku conflict in the film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku" (Bazeley, 2013).

There are two kinds of data will be used in this research are primary data and secondary data. Both of them are the research foundation to read the phenomenon. 1). Primary data is the main data that must exist to be processed as a result of research. Primary data in this research is film "Cahaya

dari Timur: Beta Maluku". 2). Secondary data is the supporting data which used to completing research data. Secondary data in this research obtained through the news sites in the internet, journal, and books.

Data collection techniques obtained with documentation. Document is fact that saved in the form of note, journal and the report of mass media. In this research, the data is collected through journal, previous research, books, news in internet, and film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku". This document will be used as material to analyze.

The unit of analysis is related with research focus. The unit of analysis can be object, individual, group, region, and time. The focus of the research is film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku". The duration of the film is 150 minutes. This film released on 19 June 2016. The object of the research is the narrative of the film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku". The object of the research will be focused on narrative structure and signification.

RESULT AND DISCUSSION

Narrative Structure of Film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku"

Tzveten Todorov is a connoisseur from Bulgaria, he provides an ideas about the structure of narrative. According to Todorov in (Eriyanto, 2015), narrative is not flat but consists of certain levels. There are five levels: equilibrium, disruption, recognizing the disruption, an attempt to repair the damage, and new equilibrium. Therefore, this research will be done by dividing narrative into 5 stages and analyzing each stage. It will be focused on how the film makers construct the Maluku conflict in every stage.

5 Stages of Tzvetan Todorov Narrative Structure:

a. *Equilibrium*: Commonly, Equilibrium is started in a balance or peace condition. If the narrative is about family, the equilibrium is a happy family condition.

- b. *Disruption of Equilibrium*: The second steps, the antagonist character will appear and disrupt the equilibrium.
- c. *Recognizing of The Disruption*: In the third step, the disruption will get worst and give a big impact. This step is often called as climax.
- d. *An Attempt to Repair The Damage*: In the fourth step, there will be a hero who will repair the damage. Although the hero has failed, he has done resistance.
- e. *New Equilibrium*: The fifth step is the ending of narrative. The disruption in the second step has successfully stopped, and back to equilibrium (Eriyanto, 2015).

Narrative analysis has several functions. *Firstly*, narrative analysis helps the researcher understanding how meaning and value are produced in the film, and how it is spread. *Secondly*, narrative analysis helps the researcher understanding how the social life and politic are told in certain perspective, and knowing the dominant social force. *Thirdly*, narrative research helps the researcher understanding the meaning behind the text. *Fourthly*, narrative analysis reflects the continuity and the change of communication (Eriyanto, 2015).

Five Stages of Narrative Structure on Film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku"

Table 1. Five Stages of Tzvetan Todorov Narrative Structure

Equilibrium	1) News about Moluccas conflict. 2) The unrest recur in Ambon in 2000. 3) In Ambon unrest, Sani can not save a boy who trapped with him. Finally, the boy becomes a victim. 4) In evacuation, Sani meets an old man who has son as victim of conflict.
-------------	---

	<p>5) There is news reporting about the death of a boy who wanted to save by Sani, he gets a shoot and die.</p> <p>6) Sani sees the children coming to frontier of Wai village which is dangerous for them.</p> <p>7) Violence has become a Maluku resident habit. When the power pole hit, they directly run and bringing chopping knife.</p> <p>8) Sani often sees the children coming to frontier village and watching the violence. It is dangerous. For keeping them, Sani decides to train them playing football. Even, Sani does not want to fight.</p> <p>9) Children become victim in Maluku conflict.</p>
Recognizing the disruption	<p>1) In 2006, Moluccas football team participates the U-15 football competition in Jakarta.</p> <p>2) The clash between Salemba and Fingky Fangky is still continued until they compete in Jakarta. Therefore, the team can't be solid and they lose the competition</p>
An Attempt to repair the damage	<p>1) Sani has a high effort for reaching peace. After despairing, Sani backs to inspire the team and faces the conflict.</p> <p>2) Finally, Sani can solve the conflict and reconcile the clash between team members as of Moluccas football team become solid and win the competition.</p>
New Equilibrium	<p>1) The winning has integrate the football player from different religion and establish the sense of unite.</p> <p>2) Moslem and Christian in Moluccas live in peace.</p>

A. Equilibrium

The result by Todorov analysis shows that narrative structure in film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku" consist of five stages of equilibrium, disruption of equilibrium, recognizing the disruption, an attempt to repair the damage, and new equilibrium. The episodes related to Maluku conflict always appear in every stage. In equilibrium, there are 5 episodes what is told in the film.

a) The first is the news about Maluku conflict. There are two reports about

Maluku conflict. It comes from national and international television. Both of the televisions have different content. If the international television proclaim the conflict in general, the national television just proclaim the unrest in Mardika and describe the condition of society.

- b) The second is the riots in Ambon. In that time, Sani Tawainella trapped in a riot and he failed save a boy. In the riots in Ambon also raised the involvement of children in war for the first time. It is represented by the action of Maluku children in doing the looting during the conflict. The second is the riots in the Wai village. For the first time Jago and his friends appear in film. They really like to watch the unrest. They go to village frontier which is very dangerous. It makes Sani concerned.
- c) The third event is unrest what is happened when Sani is working as motorcycle taxis driver. When a power pole is hit, all the people ran towards the frontier village with swords. This incident shows that the violence in Maluku conflict has become part of people's lives. The citizens consider that courage symbolized by brave to fight. When Sani is playing football with the children in beach, three mans approach and ask Sani to fight. But Sani refuses them. The Sani's rejection of the fight is the symbol of conflict violence rejection. What the Sani and the Maluku citizen do in the story, is the proof of social phenomenon which is represent in this film.
- d) The fourth is the riot that makes the children leave Matawaru field. At that time, Sani rushed over to the children and tried to prevent the children do not see the riots anymore. e) And the fifth is violence that makes Kasim foot hit a Molotov cocktail.

The narrative structure in this film is a bit different. In his book, Eriyanto explain that commonly equilibrium in narrative is

started by normal situation. In superhero narrative, the equilibrium will be started by peaceful town condition. While, equilibrium in film “Cahaya dari Timur: Beta Maluku” is started by chaotic condition. It is represented by the news that report about riot of Maluku conflict which is happened in some places in Maluku (Eriyanto, 2015).

Seen from the structure of the plot, narrative conflict in film “*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*” has centered on children involving in the riots and ultimately become victims. Starting from children who engaged in looting when riots in Ambon, the death of a boy who failed to be saved by Sani when they trapped in riots in Ambon, the death of a boy Passo caused by stray bullets, Jago and friends who always wanted to see riot, and when Kasim’s foot gets Molotov cocktails because he see the riot.

Children are one of the most important aspects in the event of a conflict. Base on *Republika* online news edition: January 17th, 2000, as many as 464 Muslims died in the riots in Ambon. Most of the victims of conflicts are children, women, and elderly people who are not involved in the conflict. According to reports MUI in North Maluku at the time, victims of unrest in North Halmahera region reached 991 people, 1702 people suffered serious injuries and minor, there are 412 other fatalities in Tobelo. At least 70%-80% of those killed in clashes were children, women and the elderly (“Kumpulan Artikel Mengenai Peristiwa Ambon,” 2000).

In interviews conducted by Akiko Horiba with LAPPAN Director (Institute for Women’s Empowerment and Child) on November 17, 2009 in Ambon that appears in the



(Figure 1: Children are the most disadvantaged in a conflict)

Humanitarian Dialogue Centre, revealed the involvement of women and children in conflict. Women and children are involved in violence, they quickly learned to make spears, machetes, arrows and bomb (Buchanan, 2011).

Children are one of the most disadvantaged by the conflict. They are weak people who can’t do anything. Not only death, violent conflicts in Maluku have increased the number of street children, orphans, and traumatic conflict. It is also likely that underlying the emergence of research studies that focus on the empowerment of children affected by conflict.

One of study that focused on children affected by conflict in the Moluccas is “*Pendidikan Perdamaian (Peace Education) Untuk Anak Korban Konflik*”. This research conducted by Sukendar from Flinder University of South Australia. There are four reasons why Sukendar conduct such research. The first is the children are the most vulnerable groups at a disadvantage when conflicts occur. The second is a bad memory of conflicts such as violence and murder that caused deep trauma. The third is the condition of children in conflict if not get a good education, can cause effects revenge for what happened to his family, so the potential to cause the next conflict. The fourth is when a conflict occurring, children do not have a religious tolerance. So feared future these children will be the actors of conflict in the future (Sukkendar, 2011).

Based on these reasons, it is reasonable if a filmmaker prefer to concentrate the film to the existence of children. They are an important aspect in the conflict who need to gain more attention. These reasons also strengthen the action of the main character Sani Tawainella, for save the children in the conflict. Because of saving children can serve as one way to improve the condition of society. “Good Memories” referred to in the movie means they will not have a grudge that could trigger a conflict in the next generation.

In equilibrium, filmmaker also represents the Maluku citizen condition in conflict. The citizens consider that courage symbolized by brave to fight. When the power pole hit, they will run to the village frontier by bringing weapon. Moreover, there is a scene when Sani is playing football with the children in beach, three mans approach and ask Sani to fight. But Sani refuses them. The Sani's rejection of the fight is the symbol of conflict violence rejection. What the Sani and the Maluku citizen do in the story, is the proof of social phenomenon which is represent in this film.

Overall, equilibrium stage is telling the confusion of Maluku condition as the result of cultural conflict. In this stage, filmmaker represents the Maluku conflict as violence, war, death, clash, and sadness. The reality construction of Maluku conflict is exposed in the equilibrium stage.

B. Disruption

The disruption is appeared by the presence of economic problems experienced by Sani's family. Besides that, when Rafi's insistence to make the PSSB. It makes the messy condition in football team. Because of this problem, Sani decides to leave the Tulehu Putra football team. It also makes the Salim and Alvin leave the football team.

But the real disruption occurred when the teams that included Moslems Tulehu and Christian Passo are merged. There is clash between Salim and Fingky. Salim accusing the father of Fingky and Fingky whom is a Police, has killed his father when riots of Maluku conflict occurred. This clash is triggered by the previous conflict and makes the football team can't play professionally.

The dispute lasted until football match in Jakarta. As a result, both of Salim, Fingky, Fangky, as well as the other members can't play professionally. Finally, the Maluku football team is barely losing. They are blaming each other because of the loosing. Salim said that the children from Passo are not supposed to joined Tulehu competed in Jakarta.



(Figure 2: A snapshot of the scene, the clash between Salim and Fingky Fangky.)

The hatred of Salim towards Passo was caused by the conflict. Besides Salim, Jago also lost his mother during the war. Maluku conflict does not only cause the death but also the sadness. It is the proof that children get the disadvantage from the conflict. They lost their parents, and get the deep sadness. And finally, they have a horrible memory of the conflict.

According to Wirawan (2010), one of the causes of cultural conflict is individualism (Wirawan, 2010). The film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku" also explains the same thing. In the dispute between Salim and Fangky, when they compete in Jakarta, Salim said that "why to compete in Jakarta there is should member from Passo? The Tulehu member team is sufficient". Then, Sani tells how much effort that he gives to make the team compete in Jakarta. Therefore, Salim should not think about himself. Even, Salim also does not think that Jago also experienced similar things. Jago also lost his mother in the conflict. The attitude of the individualist and selfish as what Salim has, can trigger the prolonged conflict.

C. Recognizing The Disruption

In 2006, Maluku football team participate the U-15 competition. In this competition, the team can't play professionally. The clash between Moslem and Christian member is still occurred, even getting bigger. It makes the team barely loosing. In this stage, Sani has started to realize that the clash is getting bigger and should be solved. In the beginning, he can't solve the disruption. He wants to back to Maluku and leave the team. Sani is barely gives up. But Glend asks Sani to try solving the problem one more time.



(Figure 3: The clash in the football team is getting bigger)

D. An Attempt to Repair The Damage

In the next stage, Sani realizes that he should solve the problem. The only way is unite the team. After a clash in a competition, Sani enters the locker room of football player. He brings the children to considering that they are brothers. So, they no need to hate each other. They supposedly unite and struggle for Maluku. There is no distinction between Islam and Christian or between Tulehu and Passo, because they are Maluku.

The Sani's statement makes the team members realize what the word "Maluku" actually means. After unite, they can play football professionally. Finally, they become the winner. The winning is not only had by the football team, but also the Maluku citizen. They cheered when the Maluku football team becomes the winner. Sani solves the dispute with a discreet way. He does not trying to resolve the Maluku Conflict by looking who is right and who is wrong, or telling them to make peace. Sani chooses to protect children from horrible memory of war. And his decision to train the kids play football makes the people of Maluku United.



(Figure 4: Sani is inspiring the team to struggle for Maluku)

What Sani was done in film "Cahaya dari Timur: Beta Maluku", also in accordance with Varshney theory. He argues that the ethnic peace should be portrayed as absence of violence, not the absence of conflict. Therefore, this movie does not tell how the Maluku conflict appeared and solved. This film talks about how they can live peacefully. The Sani's refusing joining the fighting is the appropriate action with the theory of Varshney, that violence will not be able to resolve the conflict (Varshney, 2009)

E. New Equilibrium

Football team which is consists of Moslem and Christian has made the people in Maluku realize that both of religion can live together in peace. In the final of U-15 football competition, the harmony of society in Maluku is started to represent in the film. There is Moslem come to church to listen the broadcasting of football competition. Between Moslem and Christian support the team. The winning of football competition becomes the winning of all people in Maluku. The united of football team has united the Maluku society. Peace condition is the new equilibrium of this film.



(Figure 5: Moslem and Christian live in peace)

The Result of Research

The Narrative of the riots in Maluku conflict in the equilibrium has functioned as a background story. The Maluku conflicts are positioned as the reason for the following events. Maluku conflict is the reasons why Sani back to playing ball and decided to train the kids playing football. It is also triggers the disruption of the film. It is common

in the conflict narrative in film. One of research which can support this argument is *“Representation of Armed Conflict in Columbian Cinema”* by Jerónimo León Rivera-Betancur. This research states that some films in Columbian Cinema also use conflict as the background what will trigger the narrative event. The example of their movie is the death of Eliecer Gaitán and the rise of some character that can trigger the new conflicts (Rivera-betancur, 2010).

In addition, the Maluku conflict also sparked resentment that can damage the football team working system. Because of the damage, the football team can't play professionally and barely lose. Although the violence has already subsided, the past conflict precisely triggers the emergence of new conflicts in the football team. But Sani has been trying to protect the bad impacts of the conflict against their memories. Hatred towards the opponent cannot be dammed. Therefore, this movie is trying to convey a message that implies that peace is very important. Even though the war has stopped, it does not guarantee that a conflict will not arise again. Based on the narrative of the conflict in this film, which is required in building peace is negating the violence and establish fraternity relationship. And the most important is accepting the differences of culture and religion, so they are able to live in harmony.

Appearing cultural conflict as the theme of film will remind to the conflict report in journalism. As well as the report of conflict in media, filmmaker also take a part in media battlefield “the surface upon which war is imagined and executed”. Oftentimes, film takes another side of conflict story such as try to come to terms with a traumatic past. They try to remind the effects of conflict violence (Smets, 2015: 1). It is line with what happened toward this film. The story tells how the people should terms with traumatic past. And this film positioned as media reminder of the worst impact of conflict.

CONCLUSION

Film “Cahaya dari Timur: Beta Maluku” is the film which represents the Maluku conflict in 1998. This film shows the phenomenon of social life in a conflict. This film states that violence has become a part of their life. Base on the 5 stages of narrative structure, the conflict events always appear in every stages. By plot analysis, it is result that the narrative structure of this film is a bit different. The equilibrium of this narrative is not started by netral condition, but it is started by telling Maluku conflict and the riot. In the narrative conflict in film “Cahaya dari Timur: Beta Maluku”, conflict is narrated as the background story. This conflict becomes the trigger of the following conflicts.

This film tends to concern in the impact of the conflict and how to solve it. But there are many aspects of conflict that have not been told in this film such as the politic and economic factors which trigger the religion conflict. Although it is used to avoid the controversy, but the background of Maluku Conflict is still lack.

There is possibility for the next narrative research. I hope there are better researches to show the social phenomenon which is represented in film. Therefore, it will enrich the knowledge about narrative and reality construction. Besides that, use more than one analysis technique will result the divers data.

BIBLIOGRAPHY

- Baran, S. J. (2012). *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture* (Edisi Baha). Jakarta: Erlangga.
- Bazeley, P. (2013). *Qualitative Data Abalysis Practical Strategies*. London: Sage Publication.
- Buchanan, C. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia- Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Retrieved from http://www.hdcentre.org/uploads/tx_news/64BahasaIndonesiaversion.pdf
- Cahaya dari Timur: Beta Maluku Promosikan Ambon. (2014). Retrieved from “. Kompas News

- Onli<http://travel.kompas.com/read/2014/07/01/1148496/>. Cahaya.dari.Timur.Beta.Malu
- Eko, N., & Susanto, H. (2015). International Journal of Asian Social Science Discourse Analysis Construction of Reality of The Balibo Five Case in The Balibo Movie, 5(10), 551–560. <http://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.10/1.10.551.560>
- Elvinaro. (2009). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Edisi revi). Bandung: Refika Offset.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Naratif: Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media* (Edisi ke 2). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fachruddin, A. (2015). *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*. Yogyakarta: Andi Offset. Halili, bonar tigare. (2014). Stagnasi Kebebasan Beragama. Retrieved from <http://setara-institute.org/book-review/stagnasi-kebebasan-beragama-laporan-kbb-2013/>
- Hesling, W. (2001). of Cultural Studies The past as story : The narrative structure of historical films. <http://doi.org/10.1177/136754940100400201>
- Konflik yang Dipicu oleh Keberagaman Budaya Indonesia. (2015). Retrieved from <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/21/078668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia>
- Krisandi, Ernita, Budi Setyono, T. C. U. (2013). Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi. *Ilmu Pemerintahan*. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2154>
- Kumpulan Artikel Mengenai Peristiwa Ambon. (2000). Retrieved from <http://media.isnet.org/ambon/Republika05.html>
- Mayaut, P. (2014). Cahaya dari Timur, Demi Promosikan Ambon.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa* (Edisi Ke-6). Jakarta: Salemba Humanika. Neuman. (2006). *Social Research Method*. United States of America: Pearson International.
- Qadri, M. (2016). Films and Religion : An analysis of Aamir Khan ' s PK, 20(1).
- Rivera-betancur, J. L., Ruiz-moreno, S., Pages, M., Rivera-betancur, J. L., Ruiz-moreno, S., & Pages, M. (2010). Representations of the armed conflict in Colombian cinema. <http://doi.org/10.4185/RLCS-65-2010-915-503-515-EN>
- Smets, K. (2015). *Cinemas of Conflict : A Framework of Cinematic Engagement With Violent Conflict , Illustrated With Kurdish Cinema*, 9, 2434–2455. Sukkendar. (2011). Pendidikan Damai (Peace Education) Bagi Anak-Anak Korban Konflik, 19. Retrieved from file:///C:/Users/Radik/Downloads/Documents/Sukkendar-Pendidikan_Anak_Korban_Konflik.pdf
- Thoyibi, M. (2015). Seminar Nasional Media dan Kuasa: Representasi Timpang Kaum Yahudi dan Muslim Dalam Film Schindler 's List dan The Kingdom, 33–40.
- Toni, Ahmad, (2015), Peran Film Sebagai Media Sosialisasi Lingkungan, Jurnal Komunikator, Vol. 7 No. 1, hal 41-51
- Varshney, A. (2009). *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil: Pengalaman India* (Edisi ke-2). Jakarta: Departemen Agama.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.



STRATEGI KOMUNIKASI BAHAYA KANKER SERVIKS DI PUSKESMAS NGAMPILAN TAHUN 2015

Abstrak

Kanker serviks atau leher rahim merupakan kanker nomor dua yang paling sering menyerang perempuan di seluruh dunia. Pada 2014, untuk periode Januari hingga April, sudah ada 29 kasus payudara dan lima kasus kanker serviks yang baru. Penderita kanker terbanyak berasal dari kalangan usia 25 hingga 64 tahun. Namun, kanker juga ditemukan di usia remaja 15 hingga 24 tahun. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi komunikasi bahaya kanker serviks di Puskesmas Ngampilan Yogyakarta Tahun 2015. Hasil penelitian yaitu bentuk komunikasi yang digunakan adalah komunikasi antar pribadi dan kelompok sebagai upaya sosialisasi bahaya kanker serviks dan upaya pencegahannya serta menggunakan strategi komunikasi berbasis kader dalam mensosialisasikan bahaya kanker serviks.

Kata Kunci : Kanker Serviks, Strategi Komunikasi dan Kader

ABSTRACT

Cervical cancer is the second most common cancer which attacks women around the world. On

the other hand, in 2014, there had been 29 new cases of breast cancer and 5 new cases of cervical cancer during January to April. Most cervical cancer patients are at the age of 25 to 64. However, these cancers are also found in adolescents aged 15 to 24. Therefore, the purpose of this research is to analyze the communication strategy of the dangers of cervical cancer in Puskesmas Ngampilan Yogyakarta in 2015. The result of the research shows that the form of communication which is being used is inter-personal and group communication as a way to explain the dangers of cervical cancer and the strategies to prevent this cancer.

Key Word : Cervical cancer, Communication Strategy

PENDAHULUAN

Jumlah kasus kanker di wilayah DIY tertinggi dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Fakta tersebut merupakan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, yaitu angka prevalensinya 4,2 dari 1.000 penduduk. Jumlah kasus kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks) juga terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2009, kasus kanker serviks sebanyak 111 dan kanker payudara 191 kasus. Sedangkan pada 2014, untuk periode Januari hingga April, sudah ada 29 kasus payudara dan lima kasus kanker serviks yang baru. Penderita kanker terbanyak berasal dari kalangan usia 25 hingga 64 tahun. Namun, kanker juga ditemukan di usia remaja 15 hingga 24 tahun (Tribun, 2014).

Penanganan penyakit kanker di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hampir 70% penderita ditemukan dalam keadaan sudah stadium lanjut. Khusus deteksi dini payudara dan serviks sudah dijamin dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Bahkan Perpres 69/2013 menjamin bahwa pemeriksaan IVA, papsmear, bahkan cryotherapy ditanggung program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Pemeriksaan dilakukan sekali dalam kurun waktu lima tahun (Manefa D, 2014; Kemenkes, 2014). Untuk mengatasi tingginya kasus kanker DIY,

Dinas Kesehatan DIY tengah menggalakkan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa-desa. Melalui program ini, Dinkes DIY akan merekrut kader-kader kesehatan dari masyarakat sipil. Mereka akan dilatih agar bisa mendeteksi penyakit lebih dini. Terutama penyakit-penyakit tidak menular yang sering diabaikan gejalanya oleh warga meliputi kanker, diabetes mellitus (DM), hipertensi, stroke dan obesitas (Tribun, 2014).

Berdasarkan data di atas unit terkecil dari pelayanan kesehatan masyarakat, seperti Puskesmas mempunyai sebuah strategi khususnya strategi komunikasi dalam kaitannya dengan sosialisasi bahaya kanker serviks. Strategi komunikasi sendiri hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini Puskesmas sebagai unit terkecil dari layanan kesehatan masyarakat paling bawah mempunyai sebuah perencanaan dan manajemen dalam mengatasi permasalahan kanker serviks.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Ngampilan, bahwa pelayanan kanker leher rahim telah diterapkan kepada perempuan usia subur yang telah menikah, baik secara promotif dan preventif. Jika terdapat kasus, maka dilakukan rujukan ketempat pelayanan kesehatan yang lebih lengkap fasilitasnya. Sehubungan dengan data tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Puskesmas Ngampilan dalam melakukan pencegahan dan menginformasikan bahaya kanker serviks.

Mengingat pentingnya permasalahan ini bagi masyarakat Indonesia terutama daerah Yogyakarta, khususnya wilayah Ngampilan, maka penelitian ini nantinya juga akan menunjukkan bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Puskesmas Ngampilan dalam upaya sosialisasi bahaya kanker serviks serta upaya pencegahannya sehingga masyarakat bisa melakukan deteksi dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Puskesmas Ngampilan, DIY dan difokuskan partisipasi wanita terhadap deteksi dini kanker serviks. Lokasi ini dipilih karena kejadian kanker serviks di Yogyakarta meningkat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, data bisa berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2010: 4&10). Peneliti menetapkan kriteria informan sebagai berikut : Wanita usia subur, Bidan puskesmas, Bagian promosi kesehatan, serta Penyuluh lapangan. Validitas data menggunakan triangulasi data, sedangkan analisis dengan cara reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Puskesmas Ngampilan

Puskesmas Ngampilan terletak di jalan Munir NG II/215 Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. Puskesmas Ngampilan memiliki tiga fungsi yaitu mengerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan keluarga serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Partisipasi dalam penelitian ini adalah bidan, bagian promosi kesehatan, dan dokter yang bekerja di Puskesmas Ngampilan serta kader dan masyarakat yang masih berada di Wilayah Puskesmas Ngampilan. Puskesmas memiliki pelayanan seperti konsultasi kesehatan (umum, gigi, gizi, sanitasi, P2M, dan PKM) dan berbagai pelayanan non medis lainnya.

Komunikasi antarpribadi dan Kelompok sebagai upaya sosialisasi bahaya kanker serviks dan upaya pencegahan

Komunikasi merupakan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan (seseorang, kelompok maupun massa) melalui media yang sudah ditentukan oleh komunikator supaya komunikan dapat menerima pesan dengan utuh dan dapat

dipahami. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu intrapribadi, antarpribadi, kelompok, public dan massa. Melalui wawancara yang sudah peneliti lakukan di puskesmas ngampilan, bentuk komunikasi yang diterapkan dalam sosialisasi bahaya kanker serviks oleh puskesmas adalah komunikasi komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok.

Komunikasi antarpribadi

Komunikasi antarpribadi adalah penyampaian pesan yang melibatkan dua orang dengan cara tatap muka. Bentuk komunikasi ini juga diterapkan di puskesmas ngampilan dalam sosialisasi kanker serviks, dilakukan ketika ada pasien yang sedang melakukan kontrol alat kontrasepsi atau ada yang mengeluh tentang keputihan. Seperti yang dokter Anita katakan:

“misalnya pas mengeluh keputihan atau pas konsultasi KB kan juga diselipkan tentang kanker serviks dan deteksi dini tentang kanker pada wanita, kanker serviks.”(wawancara, 26/8/2015)

Komunikasi adalah penyaluran pesan dari seseorang (komunikator) kepada individu, kelompok maupun massa (komunikan) dengan media tertentu yang mana dapat menimbulkan efek yaitu pengetahuan maupun merubah perilaku (Liliweri, 1991). Sedangkan bentuk komunikasi adalah klasifikasi bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, pada kasus sosialisasi bahaya kanker serviks, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi antarpribadi dan kelompok.

Komunikasi antarpribadi yang terjadi saat sosialisasi bahaya kanker serviks adalah pada saat pasien datang untuk periksa kontrasepsi atau jika ada yang mengeluh keputihan. Dalam melakukan pemeriksaan, bidan atau dokter menyelipkan materi tentang kanker serviks dan bagaimana pencegahannya, konseling ini dilakukan secara langsung. Efektifitas dalam komunikasi antarpribadi akan mendorong terjadinya hubungan positif

antar dokter dengan pasien, hal tersebut memberikan manfaat dan memelihara hubungan antarpribadi.

Ciri umum dari komunikasi ini adalah pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal; keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab pihak yang berkomunikasi; meskipun setiap orang dalam komunikasi ini bebas menyampaikan pesan, tapi kenyataannya bisa juga didominasi oleh satu orang. Bentuk komunikasi ini sangat efektif untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain mau menerima pesan yang disampaikan. Dalam komunikasi ini, selain bahasa lisan yang disampaikan kepada penerimanya, juga melibatkan emosi. Sehingga komunikasi bentuk ini mudah melahirkan keintiman antar pihak yang berkomunikasi (Mulyana, 2005).

Keintiman yang dilahirkan, diharapkan dapat mempengaruhi psikologis komunikan sehingga faham dengan materi yang disampaikan dan mau memeriksakan dirinya atau untuk dilakukan skrining kanker serviks yaitu iva tes atau pap smear. Dari hasil wawancara, komunikan ada kemauan untuk dilakukan skrining, namun masih malu untuk melakukan pemeriksaan. Senada dengan hasil wawancara pada responden, yaitu:

“saya ingin tapi malu kalau diperiksa di bagian kelamin” (wawancara tanggal 26 Agustus 2015).

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi komunikasi yaitu lingkungan fisik, apa pun bentuknya, mempunyai pengaruh tertentu atas kandungan pesan (apa yang disampaikan) selain juga bentuk pesan (bagaimana menyampaikan). Lingkungan yang tercipta saat konseling kanker serviks diharapkan dapat membuat nyaman pasien supaya pesan yang disampaikan benar-benar dipahami. Saat melakukan konseling bidan/dokter hanya sekedar menyelipkan materi

tentang kanker serviks, kurang mendalam, jadi pemahaman klien hanya sebatas “iya saya tau” memori tentang bahaya kanker serviks hanya bertahan sesaat dan enggan untuk melakukan deteksi dini. Kurang mendalamnya penyampaian pesan dikarenakan pasien yang banyak sehingga waktu dalam melakukan komunikasi kurang dan terkesan tergesa-gesa.

Komunikasi kelompok

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian promosi kesehatan, komunikasi yang diterapkan dalam sosialisasi bahaya kanker serviks di puskesmas ngampilan adalah komunikasi kelompok. Dimana komunikasi ini melibatkan sekumpulan orang yang saling mengenal dan terjadi *feedback* dengan pemberi materi. Strategi yang digunakan dalam menyampaikan pesan adalah dengan penyuluhan, hal ini didukung oleh pernyataan bagian promosi kesehatan, yaitu:

“biasanya mengundang kader, kita berikan penyuluhan dengan ceramah, lalu dari kader yang menyampaikan ke masyarakat”. (wawancara 26 Agustus 2015 dengan bu Dyah).

Pernyataan di atas juga didukung oleh salah satu bidan, yaitu

“memang kalau kita terjun ke masyarakat tidak mungkin, kita punya tangan panjang njih, ya bu kader, ada kader bumil, posyandu, kesehatan, nah itu juga jika disini kita berikan pengetahuan tentang kanker serviks, tentang bahayanya, dan lain sebagainya. Setiap ada pertemuan kita masuk kesana, diharapkan setelah mendapat pengetahuan dari kita atau lintas yg lain lalu menyampaikan melalui PKK atau dasawisma. Penyuluhan itu dengan menggunakan *power point*, seperti ceramah tanya jawab apa yg mereka belum ketahui”. (wawancara 26 Agustus 2016 dengan Bu Rum).

Penyuluhan terhadap kader tentang bahaya kanker serviks dan pencegahannya harus disampaikan kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

Kegiatan penyuluhan juga berfungsi sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku serta proses belajar. Namun keberhasilan penyuluhan juga dipengaruhi oleh pendidikan, umur, informasi lain dan kesadaran diri.

Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil yang bersifat terbuka, umpan balik dari peserta masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh anggota kelompok lainnya. Komunikasi dilakukan oleh bidan puskesmas ngampilan dalam mensosialisasikan bahaya kanker serviks, strategi yang dilakukan adalah penyuluhan melalui kader kesehatan. Kader kesehatan yang diberikan penyuluhan tentang kanker serviks selanjutnya meneruskan kepada masyarakat melalui PKK atau dasawisma. Strategi penyuluhan yang diterapkan mendapat respon baik dari kader maupun masyarakat, mereka antusias dalam menanggapi topik, tidak ada kecanggungan antara komunikator dengan komunikan karena mereka saling mengenal. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana (2005) yaitu komunikasi ini umumnya berlangsung pada kelompok kecil dalam masyarakat seperti keluarga, klen, kelompok diskusi. Sifat utama dari komunikasi ini adalah dilakukan dengan cara tatap muka, setiap anggota kelompok bisa langsung merespon pesan atau komunikasi peserta lainnya secara langsung dan umpan balik dari peserta masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh anggota kelompok lainnya.

Penyuluhan ini tentunya menggunakan media untuk menyampaikan pesan ke masyarakat supaya lebih mudah dipahami, media yang digunakan biasanya dalam bentuk *power point* dan leaflet. Menurut bidan di puskesmas:

“Penyuluhan itu dengan menggunakan *power point*, seperti ceramah tanya jawab apa yg mereka belum ketahui, terus terang belum pernah dengan pasien, selama ini pas kita lakukan pap smear dan iva normal semua. Media dengan leaflet, nanti bisa

diperbanyak dan dibagikan, jadi tidak selalu kita manjakan. Poster kanker serviks yang ditempel blm ada. Mungkin sudah didrop dinas tapi belum sampai disini atau belum dipasang, begitu itu ngambilnya sekalian satu dus, tapi tidak disampaikan dalam box itu poster apa.” (wawancara 26 Agustus 2016 dengan Bu Rum).

Menurut penuturan bagian promosi kesehatan puskesmas ngampilan, program-program dan SOP yang dilakukan puskesmas untuk memberikan informasi tentang bahaya kanker serviks belum ada, tetapi puskesmas tetap mempunyai preventif yaitu dengan adanya skrining dan kadang kala dilakukan penyuluhan kepada kader, namun evaluasi setelah penyuluhan juga tidak dilakukan, seperti petikan hasil wawancara berikut:

“belum ada, kayak iva itu mungkin, tapi itu juga kerja sama, tapi kalau untuk penyuluhan itu ya. Untuk masyarakat yang kurang mampu kita punya jaminan kesehatan jadi gratis kalau periksa, tapi kalau mandiri bayar 60 ribu, pap smear dan iva juga ada. Yang memberikan informasi ca serviks adalah bidan. Tugas promkes atau jobdesk ada yg turun ke lahan ada yang di dalam, di posyandu selain penyuluhan juga membina administrasinya, kan posyandu punya administrasi a-z, bagaimana penataan mejanya, lima mejanya sudah teratur atau belum, kalau penyuluhan sok per ibu atau bareng-bareng, kita masuk di meja lima. Promkes bisa dilaksanakan oleh semuanya, dari bidan atau perawatnya bisa jadi promkes, jadi gakharus saya yang turun ke lahan, kita mengkoordinir.

SOP itu belum, kalau seumpama ada iva gratis, setau saya hanya hasilnya bagaimana, setau saya pemeriksaan iva/pap smear, bukan berkala, kerja sama dengan PLKB, biasanya kalau ada iva gratis atau bareng-bareng, kalau sendiri belum kayaknya. Evaluasi setelah penyuluhan belum pernah, tapi biasane kalau penyuluhan tertarik untuk bertanya, gejalanya seperti apa, dan lainnya.” (wawancara 26 Agustus 2015 dengan bu Dyah).

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menyimpulkan bahwa mereka kurang faham tentang kanker serviks, hanya tau selintas saja. Berikut hasil wawancara dengan responden:

Responden I: “belum tau, kanker mulut rahim gitu thok, tapi pernah cek pap smear karena disuruh, gejalanya belum paham.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2016).

Responden II: “pernah seminar kecil-kecilan dari yayasan kanker, sekitar tiga apa empat bulan yang lalu, gejalanya karena makanan yang kita konsumsi, sama kurang jaga kebersihan, semua orang itu punya bibit, tinggal itu subur atau nggaknya yang memicu dari makanan dan kebersihan. Untuk pencegahannya kanker serviks, apa ya,, kalau dari penyuluhan menjaga kebersihan saja, kalau hubungan sex harus dengan pasangannya, intinya pergaulan, dari puskesmas belum pernah ada penyuluhan, tapi pernah dengarnya dari bu kader, dari PKK RW”. (wawancara tanggal 26 Agustus 2016).

Menurut Stark, et all (2008) penyuluhan dipengaruhi oleh pendidikan yaitu seseorang dengan latar belakang pendidikan tinggi, lebih memiliki pengetahuan tentang HPV kanker leher rahim. Dengan tingginya tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku yang diharapkan dari hasil penyuluhan. Namun menurut Notoatmojo (2007) hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran diri yaitu melalui terbentuknya prasangka yang positif akan mempengaruhi penerimaan terhadap informasi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan, prasangka yang negatif akan mempengaruhi bentuk penolakan.

Hasil penelitian Nugraheny, E tahun 2011 menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan 5% didapatkan hasil $P_{sig} 0,00 < 0,05$ dengan $F_{hitung} 18.440 > F_{tabel} 2.56$, sehingga dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh pemberian penyuluhan terhadap perilaku. Penyuluhan tentang bahaya kanker leher rahim selain memberikan pengetahuan juga mengajak masyarakat untuk mau

berpartisipasi aktif untuk melakukan skrining. Namun pada kenyataannya hanya sebagian masyarakat yang mau melakukan skrining kanker leher rahim dengan alasan malu, enggan, tidak punya waktu dan takut.

Strategi Komunikasi “Berbasis Kader”

Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan taktik operasionalnya, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbesa sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi (Effendy, 2005).

Strategi komunikasi sosialisasi kanker serviks merupakan perencanaan dan manajemen dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya kanker serviks beserta upaya pencegahannya untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat kanker serviks. Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang dipilih dan dilatih oleh Puskesmas setempat sehingga bersedia melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Mengundang kader merupakan salah satu strategi komunikasi, karena mereka tahu kader adalah satu orang yang dapat dipercaya oleh puskesmas untuk mengkomunikasikan bahaya kanker serviks dengan benar. Secara tidak langsung media yang digunakan adalah melalui kader. Kader adalah komponen utama dalam strategi komunikasi, jadi komunikasi ini berbasis kader. Hal ini disampaikan oleh bidan maupun bagian promosi kesehatan, sebagai berikut:

Promkes : “kita berikan penyuluhan dengan ceramah kepada kader, lalu dari kader yang menyampaikan ke masyarakat. Masyarakat datang untuk periksa sendiri itu tidak ada, tapi jika ada moment. Tapi biasane penyuluhannya tertarik, tanya gejala apa, seperti apa, kalau ada kegiatan iva atau pap smear kita sampaikan ke kader lalu menginfokan ke masyarakat.

Disampaikan syaratnya, biasanya kader yang nyari pasien, tapi sedikit karena kesadaran belum ada.”

Bidan : “Setiap ada pertemuan kita masuk kesana, diharapkan setelah mendapat pengetahuan dari kita atau lintas yang lain lalu menyampaikan melalui PKK atau dasawisma. Penyuluhan itu dengan menggunakan power point, seperti ceramah tanya jawab apa yang mereka belum ketahui. Hambatannya untuk kesadaran iva/ pap smer setahun sekali, karena malu, jadi kalau ada program seperti itu ngoyak, mau dipriksa, mau dibuka malu, KIA jadwal ada, bu kader aja itu yang datang yah,, sedikit, kesadarannya masih kurang”.

Penyuluhan kanker serviks adalah penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya faham tentang kanker serviks, bahayanya maupun pencegahannya, sehingga masyarakat aktif dalam kegiatan skrining awal kanker serviks. Menurut Arif (2009), bahwa penyuluhan bukan hanya sekedar penyebaran informasi tetapi sebagai proses perubahan perilaku sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh pihak lain. Proses yang dilakukan tidak hanya sekali tapi berlangsung terus menerus sampai terjadinya perubahan perilaku, dimana klien mau menerima manfaat penyuluhan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Leung S dan Leung I (2010) bahwa strategi program dengan cara promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan perlu dikembangkan karena berhubungan dengan tingkat kehadiran deteksi dini kanker serviks.

Pengetahuan merupakan hasil dari seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek. Pemberian penyuluhan oleh kader dimaksudkan untuk mencapai tingkat pengetahuan pertama yaitu tingkat tahu, dimana responden mampu mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Adanya penyuluhan tentang kanker serviks

diharapkan dapat membawa perubahan perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Meskipun ada beberapa yang menolak untuk melakukan deteksi dini, namun masih ada masyarakat yang bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bu Marsilah, salah satu warga Ngampilan :

“iya saya pernah tes IVA di puskesmas karena ada program gratis, tapi satu tahun yang lalu.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2015).

Selain pencegahan primer, kanker serviks juga dapat dicegah dengan dilakukan tes paps smear/ iva tes secara teratur, namun hal ini pun menjadi hambatan puskesmas dalam melakukan skrining karena kesadaran masyarakat yang masih rendah. Puskesmas bekerja sama dengan instansi lain dalam mengadakan iva atau pap smear secara massal. Hal ini disampaikan oleh bidan, bahwa:

“kesadaran iva/ pap smear setahun sekali itu rendah, karena malu, jadi kalau adaprogram seperti itu ngoyak, mau dipriksa, mau dibuka malu, wong kita jadwal ada, bu kader aja itu yang dtg, yah,,sedikit, kesadarannya msh kurang. Untuk masyarakat kurang mampu ada BPJS, kita juga kerja sama dengan lab. cito. Kita kasih rujukan ke lab.cito. untuk yang punya jaminan kita arahkan kesana, itu aja cuma yang ada keluhan kita kirim. Kalau iva tanpa indikasi bisa kita lakukan, kalau pap smear ada indikasi dan usapannya kita kirim kesana, tapi bayar 55ribu untuk yang mandiri. kalaugratis aja yang datang aja susah e, kalau secara masal program puskesmas itu belum ada karena ada program dari YKI, disana sudah mengadakan kan, diplotkan ke beberapa puskesmas, dijatah berapa orang, dari PLKB juga ada, selain itu kita nyaringnya dari periksa KB. Khusus dari puskesmas mengadakan sendiri belum ada. Kita masih mengacu dari lintas-lintas yang lain, kecuali kalau besuk swadaya, kita bisa buat perencanaan. Kita mengajukan saja disana masih diolah, kalau dana ada kita lebih

luwes”.

Promkes : (hambatan)Masyarakat itu tau nggak tau, sadar dan ngak sadar, tahu tapi takut hasilnya, saya itu takut e klo periksa, takut nanti iya saya kena, ya saya pengen tau, cepet ditangani, takut priksa dan hasilnya

Responden 1: Terakhir 2014 pap smear gratis dari BKKBN, ada rencana, dulu pernah periksa di PKBI waktu anak tk (iva), ditawarkan ke warga tidck mau, mau tapi pas pelaksanaan takut.

Responden 2: Pngen tapi belum ada waktu

Responden 3: Pernah tes iva di puskesmas saat program gratis. Beranak 3, menikah umur 18 tahun. Tes iva sekitar satu tahun yang lalu, hasil bagus. Disarankan kalau mau tahu lebih lanjutnya periksanya continue dan disarankan pap smear

Skrining merupakan upaya deteksi dini untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan dengan tes dan pemeriksaan tertentu, skrining kanker serviks yang dilakukan di puskesmas adalah dengan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan juga Pap Smear (dikirim ke laboratorium).

Kurang berhasilnya strategi komunikasi berbasis kader ini karena tidak adanya *feedback* sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum faham tentang apa itu kanker serviks dan bahayanya secara utuh, sehingga masih enggan untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Pihak Puskesmas pun juga tidak melakukan evaluasi kepada kader yang diberikan penyuluhan maupun kepada masyarakat yang sudah diberikan penyuluhan. Hal ini menjadi kendala untuk memahami tingkat pengetahuan masyarakat.

Peran kader sebagai penyuluh dan penyampai informasi diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kanker serviks sehingga dapat merubah perilaku masyarakat. Sebagai motivator, kader diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai deteksi dini

kanker serviks sehingga wanita usia subur yang telah menikah mau dengan sukarela melakukan pemeriksaan pap smear/ iva test di Puskesmas.

Kendala kader dalam menyampaikan materi kanker serviks adalah pada saat penyuluhan beberapa ibu ada yang tidak hadir, beberapa ibu kurang memperhatikan materi yang disampaikan, leaflet yang diberikan kurang menarik, banyak ibu PUS yang tidak mau melakukan pap smear/ iva tes karena malu dan takut akan hasilnya.

SIMPULAN

Bentuk komunikasi yang digunakan oleh Puskesmas Ngampilan dalam sosialisasi bahaya kanker serviks dan upaya pencegahannya adalah komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Terbukti dengan untuk sebagian masyarakat ini cukup efektif.

Puskesmas Ngampilan menggunakan strategi komunikasi berbasis kader, meskipun hal tersebut tidak disadari secara langsung oleh pihak puskesmas namun kunci dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas adalah optimalisasi kader.

Mengingat letak dari puskesmas ngampilan yang berada di pusat kota yogyakarta namun masih menggunakan strategi komunikasi berbasis kader, hal ini membuktikan bahwa peran *opinion leader* masih berfungsi di pusat kota. Penelitian ini sebenarnya mematahkan asumsi-asumsi yang berkembang tentang *opinion leader* yang tidak dipakai di perkotaan tetapi efektif di pedesaan.

Berdasar hasil penelitian ini saran yang kami berikan agar puskesmas ngampilan membuat strategi komunikasi yang lebih terstruktur dan dikelola dengan baik demi sebuah informasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

Bagian promosi kesehatan Puskesmas Ngampilan sebaiknya membuat poster atau leaflet tentang bahaya kanker serviks dan pencegahannya.

Mengadakan evaluasi setelah dilakukan penyuluhan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. 2009. Pengertian Penyuluhan. www.pondokinfo.co.id. Diunduh tanggal 10 Juni 2015.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Leung S and Leung I. 2010. Cervical Cancer Screening: knowledge, Health Perception and Attendance rate Among Hong Kong Chinese Women. PubMed Central. Agustus 2010. 2:221-228.
- Liliweri, Alo, 2005. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta : LkiS
- Leung S and Leung I. 2010. Cervical Cancer Screening: knowledge, Health Perception and Attendance rate Among Hong Kong Chinese Women. PubMed Central. Agustus 2010. 2:221-228.
- Kemendes RI. 2014. JKN Menjamin Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara. <http://www.depkes.go.id/article/print/2014270003/jkn-menjamin-pemeriksaan-deteksi-dini-kanker-leher-rahim-dan-payudara.html>
- Maneva D, 2014. <http://www.beritasatu.com/kesehatan/164592-di-indonesia-kasus-kanker-payudara-dan-serviks-tertinggi.html>
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : Rosda Karya.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraheny, Esti. 2010. *Pengaruh Pemberian Penyuluhan terhadap Perilaku untuk Melakukan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Ditinjau dari Umur pada Guru SMA di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta Tahun 2010*. Tesis
- Sagiyanto, Asriyani, 2014, Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Event Jackloth Summer Festival 2014 «Heroes of Our Time», Jurnal Komunikator, Vol 6. No.2
- Stark. A; Gregoire. L; Pilarski. R; Zarbo. A; Gaba. A, and Wayne D, Lancaster. 2008. *Human Papilomavirus, Cervical Cancer and Womens Knowledge*. PubMed Central. 32(1): 15-22; 10 April 2008.
- Tribun*. 2014. *Kasus Kanker di DIY Tertinggi Nasional*. <http://jogja.tribunnews.com/2014/07/03/kasus-kanker-di-diy-tertinggi-nasional>

Indeks

A

Akses II, 1
 Akses informasi 1, 3, 4, 5, 8, 9
 Asumsi 48

B

Background 29, 32, 37, 38
 Berita III, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 21, 22, 23, 25, 26
 Budidaya 7, 8, 9

C

Conflict 11, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
 37, 38, 39
Content 30, 31, 32, 34
Cultural conflict 29, 32, 36, 38

D

Define Problems 16, 19, 21, 22, 23, 24
 Dekonstruksi 14
Diagnose Causes 16, 19, 21, 22, 23, 24
 Dialog 32
 Dominan 4, 7, 8

E

Efektif 2, 43, 48
 Equilibrium 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38
 Evaluasi 15, 45, 47, 48

F

Facing Risk and Responsibility 12
Feedback 44
Figere 12
 Film 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
 Filmmaker 32, 35, 36, 38
 Framing 11, 14, 15, 16, 26, 27
 Frekuensi komunikasi 2, 3, 8

H

Human interest 14

I

Ideologi 18, 25, 26
 Informan 25, 42
 Informasi II, III, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
 15, 17, 18, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48
 Interpersonal 1, 3, 6, 8

J

Jaringan 4
 Jaringan komunikasi 4
 Journalism 38

K

Kanker 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
 Kanker payudara 41
 Kanker serviks 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
 Karaton II, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
 22, 23, 24, 25, 26
 Komoditas 4, 6
 Komunikan 2, 42, 43, 44
 Komunikasi antarpribadi 42
 Komunikasi kelompok 44
 Komunikator I, III, 2, 42, 43, 44
 Konflik 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 29, 39
 Koran IV, V, 7
 Korelasi 5
 Kosmopolit 4
 Kualitatif 11, 16, 42

L

Leaflet 44, 48
 Lokal 6, 12, 13, 14, 15, 18, 25

M

Make Moral Judgement 16, 20, 21, 22, 24
Management 26, 42, 46
 Manajemen konflik 18
Mater frame 16
 Media cetak I, 3, 4, 25
 Media elektronik 4

Media komunikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Media massa 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25
Media online 13, 14, 16, 17, 18, 25
Mediasi 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25
Mediator 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25
Message 13, 30, 31, 32, 38
Multicultural country 29

N

Narrative 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39
Nasional 14, 15, 25, 39, 48

O

Online III, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 35
Opinion leader 48
Optimalisasi 48

P

Penyuluh lapangan 42
Planning 42, 46
poster 45, 48
Produksi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Promosi 42, 44, 45, 46, 48
Puskesmas II, 41, 42, 46, 47, 48

R

Realitas 14, 15, 16, 18, 25
Rekonsiliasi 11, 12, 14, 19, 21, 24, 26
Research subjects 32

S

Signifikan IV, 8, 45
Simbolik 18
Skrining 47
Socio-histories 32
Sound 31, 32
Stakeholder 12, 13
Strategi komunikasi 41, 42, 46, 47, 48

T

Teknologi III, 1, 2, 3, 4, 7, 9
Teks IV, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Televisi 7, 15
T-hitung 8
Treatment Recommendation 16, 21, 22, 23, 24
T-Tes 8

V

Violence 34, 35, 36, 37, 38